



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
TAHUN 2016**

**DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
2017**

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

Dasar hukum penyusunan LAKIP diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Menteri Perindustrian menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengembangan perwilayahan industri di lingkungan Kementerian Perindustrian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Dengan dukungan alokasi anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan berbagai program pembangunan guna merealisasikan target-target pembangunan sektor pengembangan perwilayahan industri sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian dan Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Melalui LAKIP ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2016, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal
Pengembangan Perwilayahan
Industri,

Imam Haryono

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2016 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Kunci bagi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri pada tahun tertentu. Sasaran tersebut mempunyai target masing-masing, dimana pelaksanaannya didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA.

Total jumlah DIPA yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri untuk tahun anggaran 2016 sebelum *selfblocking* adalah sebesar **Rp 404.100.947.000,-**. Dari total dana tersebut telah berhasil direalisasikan sebesar **Rp 157.316.411.099,-** (38,92%) sedangkan berdasarkan anggaran setelah *selfblocking* berhasil direalisasikan sebesar 90,83% dari anggaran setelah tanpa *selfblocking* sebesar **Rp.175.192.388.000**

Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan, rata-rata nilai capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri adalah sebesar 104,66%. Nilai tersebut telah menunjukkan bahwa program utama Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dalam melaksanakan kinerjanya berhasil dengan sangat baik.

Untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung sasaran yang telah ditetapkan dan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan bagi unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan pelayanan bagi dunia usaha bidang pengembangan perwilayahan industri, perlu kiranya dilakukan perbaikan terutama melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Dari sisi keuangan diharapkan pula adanya pembenahan dalam upaya pencairan dana yang selama ini mengalami berbagai hambatan serta bagi penanggung jawab kegiatan lebih meningkatkan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri merupakan salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 105 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri termasuk pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Pengembangan Kawasan Industri dan Pengembangan Sentra IKM sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perwilayahan industri;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan perwilayahan industri;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

B. Peran Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai peran strategis dalam mewujudkan industri berbasis sumber daya daerah yang berdaya saing global. Direktorat Jenderal ini juga menjadifasilitator dalam perencanaan bersama untuk mewujudkan pembangunan industri yang koordinatif, kooperatif dan komprehensif.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri dari 4 Unit Eselon II, yaitu :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari 4 Unit Eselon III yaitu Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; Bagian Hukum dan Kerja Sama; Bagian Keuangan; serta Bagian Kepegawaian dan Umum.

2. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fasilitasi industri wilayah Maluku, Sulawesi dan Papua. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I terdiri dari 3 Unit Eselon III yaitu Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah, dan Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri.

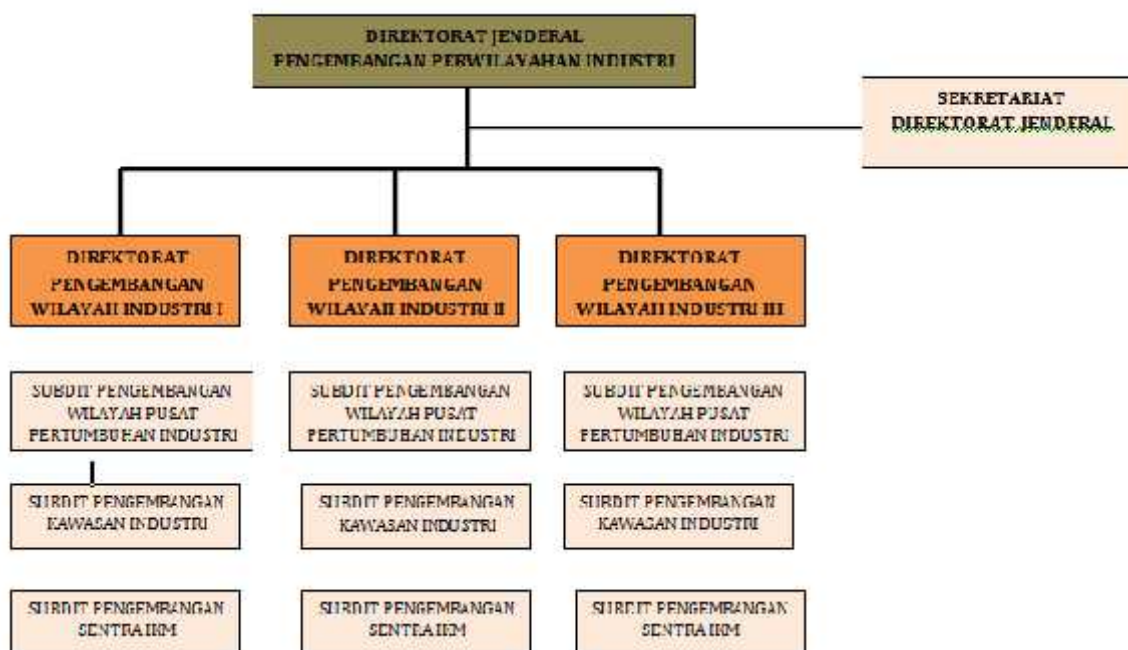
3. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fasilitasi industri wilayah Sumatra dan Kalimantan. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II terdiri dari 3 Unit Eselon III yaitu Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah, dan Subdirektorat Kawasan Pengembangan Industri.

4. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fasilitasi industri wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III terdiri dari 3 Unit Eselon III yaitu Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah dan Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri.

Berikut ini gambar Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

Pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PPI didukung oleh 92 orang pegawai yang berada pada 4 Unit Eselon II yaitu 34 orang pegawai pada Setditjen PPI, 20 orang pegawai pada Direktorat PWI Wilayah I, 20 orang pegawai pada Direktorat PFI Wilayah II, 17 orang pegawai pada Direktorat PFI Wilayah III.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa rencana strategis (Renstra) merupakan bagian dari proses penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis) dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun untuk dijadikan sebagai alat bantu melaksanakan tugas, fungsi dan program kegiatan, dan merupakan tolok ukur pencapaian sasaran dan kinerja.

A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015-2019

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri adalah: "Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat dan Tersebar ke Seluruh Wilayah NKRI".

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mengemban misi :

- 1) Mengembangkan Wilayah pusat-pusat pertumbuhan industri untuk mendayagunakan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah sekitarnya;

- 2) Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri melalui penataan kesesuaian fungsi lokasi industri dan tercapainya optimalisasi penggunaan lahan;
- 3) Mengembangkan Kawasan Industri yang terintegrasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berdaya saing;
- 4) Membangun Sentra Industri Kecil dan Menengah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi misi adalah “Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI”. Adapun indikator tujuan sebagai berikut :

- a. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional;
- b. Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.

b. Sasaran

Berlandaskan visi dan misi, maka dapat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya peranan sektor industri terhadap PDRB daerah khususnya di luar Jawa;
- 2) Terwujudnya industri berbasis sumber daya lokal yang memiliki keunggulan bersaing;
- 3) Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah;
- 4) Tersebaranya industri di luar Pulau Jawa.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

a. Arah Kebijakan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan sebagai arah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Adapun arah kebijakan dalam Renstra mencakup strategi pokok dan strategi fungsional yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Strategi Pokok

- a) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;
- b) Tumbuhnya industri di daerah;
- c) Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
- d) Tumbuh dan berkembangnya Kawasan industri;
- e) Tumbuh dan berkembangnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

2) Strategi Fungsional

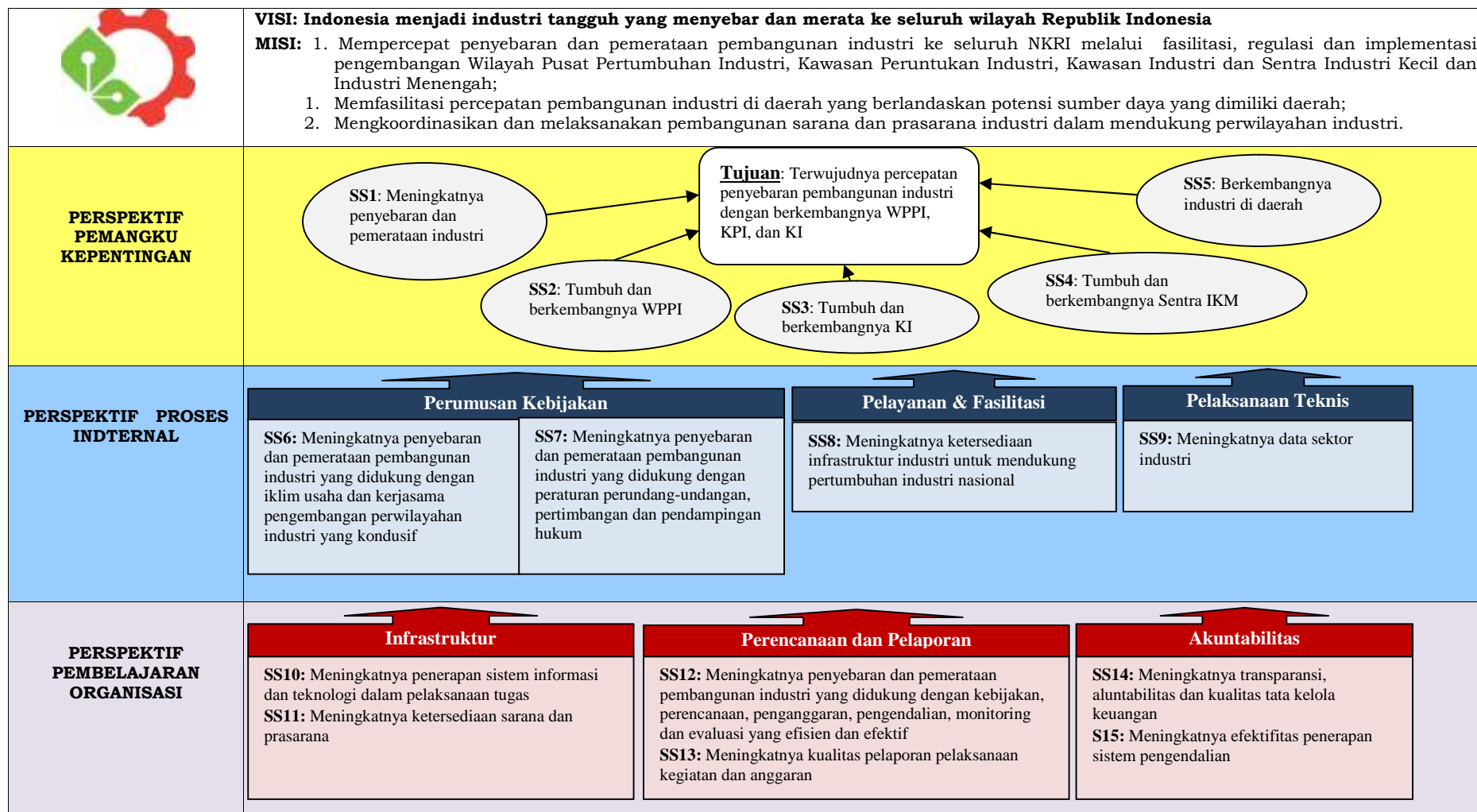
Strategi fungsional dirumuskan ke dalam arah kebijakan dalam rencana strategispengembangan perwilayahan industri dengan cara menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah pertumbuhan populasi tersebut serta arahpeningkatan produktivitasnya. Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;
- b) Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di luar Jawa dan Jawa;
- c) Tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri (KI);
- d) Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM);
- e) Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f) Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik;
- g) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi yang efisien dan efektif;
- h) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif;

- i) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum;
- j) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan aset BMN;
- k) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian.

b. Peta Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian telah dibangun Peta Strategi Ditjen PPI yang mengacu pada visi dan misi Ditjen PPI. Selanjutnya dalam Peta Strategi diuraikan peta panduan (*road map*) yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Peta Strategi Ditjen PPI dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini.



Gambar 2.1. Peta Strategi Ditjen PPI

Berdasarkan peta strategi tersebut, target yang akan dicapai Ditjen PPI pada rencana strategis dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019, yaitu meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI. Keberhasilan program ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- IKU Pertama** : Kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional;
- IKU Kedua** : Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional;
- IKU Ketiga** : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di luar Jawa;
- IKU Keempat** : Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di luar Jawa;
- IKU Kelima** : Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di luar Jawa;
- IKU Keenam** : Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI;
- IKU Ketujuh** : Berkembangnya industri unggulan daerah dalam WPPI;
- IKU Kedelapan** : Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan;
- IKU Kesembilan** : Beroperasinya Pusat Layanan Teknis Kawasan Industri berupa Pusat Inovasi;
- IKU Kesepuluh** : Terfasilitasinya Sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan;
- IKU Kesebelas** : Terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota;
- IKU Keduabelas** : Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri;
- IKU Ketigabelas** : Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri; dan

IKU Keempatbelas : Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi.

4. Kondisi yang Diharapkan Tahun 2015-2019

Kondisi yang diharapkan akan dicapai pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk-produk olahan yang bernilai tambah melalui pengembangan kompetensi inti industri daerah, industri unggulan provinsi dan pengembangan kawasan industri;
- b. Tersebarnya industri ke luar Pulau Jawa sehingga peran industri di luar Pulau Jawa meningkat sampai di atas 35%;
- c. Tumbuhnya industri-industri potensial yang mampu menciptakan lapangan kerja di daerah yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah;
- d. Terpusatnya seluruh kegiatan industri di suatu kawasan industri.

Diharapkan dalam kurun waktu 2015-2019 telah terjadi pergeseran penyebaran industri ke luar Pulau Jawa. *Share* Pulau Jawa diharapkan menurun dari angka tahun 2009 sebesar 75,00% menjadi 64,79% pada tahun 2015. Penurunan *share* ini diharapkan akan berlanjut terus sehingga mencapai 47,65% pada tahun 2025.

Sebaliknya, peran industri di luar Pulau Jawa diharapkan mengalami peningkatan menjadi 35,21% pada tahun 2016. Peningkatan *share* ini diharapkan akan berlanjut terus sehingga mencapai 52,35% pada tahun 2025.

5. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Untuk mencapai visi, misi dan sasaran strategis seperti diuraikan diatas perludisusun rencana kerja yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Saat ini, program hanya terdapat pada unit organisasi setingkat Eselon I yaitu Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri, sedangkan pada tingkat Eselon II masing-masing

hanya terdapat satu kegiatan. Adapun rincian kegiatan Ditjen PPI untuk tahun 2016 sebagai berikut:

a. Pengembangan Wilayah Industri I yang terdiri dari *output* sebagai berikut:

- 1) Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitas Industri di Daerah Wilayah I;
- 2) Fasilitas Pengembangan WPPI di Wilayah I;
- 3) Pengembangan/Pembangunan Kawasan Industri (KI) Wilayah I;
- 4) Fasilitas Pengembangan Sentra IKM di Wilayah I;

b. Pengembangan Wilayah Industri II yang terdiri dari *output* sebagai berikut :

- 1) Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitas Industri di Daerah Wilayah II;
- 2) Fasilitas Pengembangan WPPI di Wilayah II;
- 3) Pengembangan/Pembangunan Kawasan Industri (KI) Wilayah II;
- 4) Fasilitas Pengembangan Sentra IKM di Wilayah II;

c. Pengembangan Wilayah Industri III yang terdiri dari *output* sebagai berikut :

- 1) Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitas Industri di Daerah Wilayah III;
- 2) Fasilitas Pengembangan WPPI di Wilayah III;
- 3) Pengembangan/Pembangunan Kawasan Industri (KI) Wilayah III;
- 4) Fasilitas Pengembangan Sentra IKM di Wilayah III;

d. Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri yang terdiri dari *output* sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
- 2) Laporan *Monitoring* dan Evaluasi serta *Updating* Data Pengembangan Sektor Perwilayahan Industri;
- 3) Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha dan Kerjasama Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 4) Laporan Keuangan dan BMN;
- 5) Pelaksanaan Pembinaan Aparatur;

- 6) Layanan Perkantoran;
- 7) Kendaraan Bermotor;
- 8) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;

B. Rencana Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Industri;
2. Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Luar Jawa dan Jawa;
3. Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri;
4. Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM);
5. Berkembangnya Industri di Daerah melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri yang didukung dengan Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi yang Efisien dan efektif;
7. Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri yang didukung dengan Iklim Usaha dan Kerjasama Pengembangan Perwilayahan Industri yang Kondusif;
8. Meningkatnya Penyebaran dan pemerataan Pembangunan Industri yang didukung dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pertimbangan, dan Pendampingan Hukum.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dijabarkan melalui indikator kinerja yang meliputi target pencapaian dan kebijakan yang diambil. Sasaran didukung oleh program dan kegiatan yang masing-masing juga memiliki indikator kinerja serta target pencapaiannya. Indikator kinerja dari sasaran strategis di atas antara lain :

1. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :
 - a) Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional, dengan target 28,06%;

- b) Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional, dengan target 17,50%;
 - c) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Luar Jawa, dengan target sebesar 8,61%;
 - d) Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Luar Jawa, dengan target sebesar 29,50%;
 - e) Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di Luar Jawa, dengan target sebesar 13,50%;
2. Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Luar Jawa dan Jawa, dengan Indikator Kinerja Utama :
 - a) Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI, dengan target 8 dokumen;
 - b) Berkembangnya industri unggulan daerah dalam WPPI, dengan target 30 daerah.
 3. Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :
 - a) Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan, dengan target 10 kawasan industri;
 - b) Beroperasinya Pusat Layanan Teknis Kawasan Industri berupa Pusat Inovasi Kelapa Sawit (PIKS) Sei Mangkei dan Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) Palu, dengan target 2 kawasan industri.
 4. Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM), dengan Indikator Kinerja Utama berupa Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan, dengan target 8 SIKIM;
 5. Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan target Indikator Kinerja Utama berupa Terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 62 daerah;
 6. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang efisien dan efektif, dengan target Indikator Kinerja Utama berupa Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi sebanyak 5 dokumen;

7. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif, dengan target Indikator Kinerja Utama Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri sebanyak 10 rekomendasi;
8. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum, dengan target Indikator Kinerja Utama berupa Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri, dengan target 2 peraturan.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Sesuai Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Penetapan Kinerja berubah menjadi dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dokumen penetapan kinerja dibuat diawal tahun anggaran 2014, sehingga dokumen penetapan kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Ditjen PPI Tahun 2016

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional	28.06%
		Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional	17.50%
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Luar Jawa	8.61%
		Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Luar Jawa	29.50%
		Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Luar Jawa	13.50%
2	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Luar Jawa dan Jawa	Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI	8 dokumen
		Berkembangnya industri unggulan daerah dalam WPPI	30 daerah
3	Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri	Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan	10 kawasan industri
		Beroperasinya Pusat Layanan Teknis Kawasan Industri berupa Pusat Inovasi Kelapa Sawit (PIKS) Sei Mangkei dan Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) Palu	2 kawasan industri
4	Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan	8 SIKIM
5	Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota	62 daerah
6	Meningkatkannya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, <i>monitoring</i> , dan evaluasi yang efisien dan efektif	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi	5 Dokumen
7	Meningkatkannya penyebaran dan pemerataan pembangunan	Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan	10 Rekomendasi

	industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif	kerjasama pengembangan perwilayahan industri	
8	Meningkatkannya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	2 Peraturan

Keterangan : *) merupakan dana APBN-P

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, masing-masing sasaran di atas didukung oleh program dan kegiatan antara lain :

1. Dokumen Perencanaan dan bahan koordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah I (Papua, Maluku, dan Sulawesi);
2. Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Wilayah I (Papua, Maluku, dan Sulawesi);
3. Dokumen Perencanaan Kawasan Industri Prioritas Nasional Wilayah I (Papua, Maluku, dan Sulawesi);
4. Kawasan Industri Prioritas Nasional Wilayah I (Papua, Maluku, dan Sulawesi);
5. Dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri prioritas lainnya Wilayah I (Papua, Maluku, dan Sulawesi);
6. Dokumen perencanaan pembangunan sentra IKM di Wilayah I (Papua, Maluku, dan Sulawesi);
7. Sentra IKM Wilayah I (Papua, Maluku, dan Sulawesi);
8. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I;
9. Dokumen Perencanaan dan bahan koordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan);
10. Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan);
11. Kawasan Industri Prioritas Nasional Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan);
12. Dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri prioritas lainnya Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan);

13. Dokumen perencanaan pembangunan sentra IKM di Wilayah II (Sumatera dan Kalimantan);
14. Rekomendasi kebijakan peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri;
15. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II;
16. Dokumen Perencanaan dan bahan koordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah III (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara);
17. Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Wilayah III (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara);
18. Dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri prioritas lainnya Wilayah III (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara);
19. Dokumen perencanaan pembangunan sentra IKM di Wilayah III (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara);
20. Sentra IKM Wilayah III (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara);
21. Rekomendasi kebijakan peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri;
22. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II;
23. Kebijakan Perwilayahan Industri;
24. Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha dan Kerjasama Pengembangan Perwilayahan Industri;
25. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
26. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit;
27. Data dan Informasi;
28. Layanan Perkantoran.

A. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Penilaian atas pelaksanaan tugas Ditjen PPI dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan visi, misi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Analisis pencapaian tahun 2016 dilengkapi dengan perbandingan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2015.

Selanjutnya, Ditjen PPI melaksanakan program percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dimana Ditjen PPI menyelenggarakan Kegiatan penyusunan dan evaluasi program pengembangan perwilayahan industri dengan pagu anggaran sebesar Rp 175.871.953.000,-.

Secara garis besar, realisasi kinerja Ditjen PPI tahun 2016 untuk hampir semua sasaran yang ditetapkan targetnya mencapai 100 persen bahkan ada yang melampaui 100 persen. Pengukuran kinerja terhadap 8 sasaran program/kegiatan dengan 14 indikator kinerja utama secara rinci diuraikan pada tabel-tabel berikut ini.

1. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri

Tabel 3.1. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di luar pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional	27.70%	28,97%	28,06%	28,23%	100%
		Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional	17.00%	16,96%	17,50%	17.83%	101%

	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Luar Jawa	8.35%	4,58%	8,61%	6,23%	72,35%
	Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Luar Jawa	31.09%	30,48%	29,50%	44,20%	149%
	Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di Luar Jawa	13.02%	16,15%	13,50%	16,04%	118%
Nilai capaian						
sasaran strategis Meningkatkan penyebaran dan pemerataan industri						80%
Ket : T = target; R = realisasi						

Nilai capaian sasaran strategis Meningkatkan penyebaran dan pemerataan industri sebesar 80% karena dari 5 indikator yang ada hanya 4 yang dapat tercapai oleh Ditjen PPI. Adapun capaian tersebut diperoleh melalui indikator kinerja yang terdiri dari :

a. **Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.**

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang digunakan juga pada tahun 2015, sehingga capaiannya dapat dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 28,06 persen, sementara realisasinya melebihi target sebesar 28.23%. Perhitungan pangsa nilai tambah sektor industri tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional tahun 2016 yang telah dirilis oleh BPS.

Pangsa nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional melebihi target yang ditetapkan. Kondisi ini didukung oleh percepatan pembangunan yang sedang digenjut pemerintah di luar Pulau Jawa seperti perbaikan infrastruktur, ketersediaan energi (gas dan listrik) dan peningkatan SDM/ tenaga kerja yang kompeten sehingga menyebabkan investasi-investasi baru khususnya di sektor industri manufaktur mulai bertumbuh di luar Pulau Jawa. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2, dalam 4 tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya peranan sektor industri di luar Pulau Jawa. Adapun peningkatan yang terjadi karena adanya pembangunan 14 Kawasan Industri Prioritas yang menjadi salah satu program Nawacita Presiden Jokowi yang semuanya berpusat di luar Pulau Jawa. Dengan adanya pembangunan 14 Kawasan Industri Prioritas diharapkan kedepannya secara perlahan-lahan kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional meningkat, sehingga dalam jangka panjang yaitu pada tahun 2035 kontribusinya menjadi sekitar 40 persen.

Tabel 3.2. Kontribusi Sektor Industri di Luar Jawa

(Dalam %)

Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016*)
Jawa	73.07	72.78	72.64	72.27	28,23
Luar Jawa	26.93	27.22	27.36	28.97	71,77
Nasional	100,00	100,00	100,00	100,00	

*) Angka Proyeksi

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2016)

Tabel 3.3 Kontribusi Sektor Industri di Luar Jawa Menurut Wilayah

(Dalam %)

No	Wilayah	2013	2014	2015	2016
1	Sumatera	20.63	20.87	21.10	21.34
2	Kalimantan	3.27	3.28	3.29	3.34
3	Bali	0.55	0.55	0.55	0.55
4	Nusa Tenggara	0.18	0.18	0.18	0.18
5	Sulawesi	2.27	2.29	2.30	2.34
6	Maluku	0.10	0.10	0.10	0.10
7	Papua	0.22	0.22	0.21	0.21
	Total	100.00	100.0	100.0	100.0

*) Angka Proyeksi

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2016)

- b. **Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.**

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 17,50 persen, sementara realisasinya adalah 15,2%. Capaian tersebut diperoleh dari pengolahan data Industri Besar Sedang (IBS) Tahun 2015. Dilihat dari sisi sektor industri, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kinerja sektor industri baik karena faktor-faktor di tingkat global maupun di tingkat nasional. Di tingkat global disebabkan oleh menurunnya ekspor produk-produk hasil industri ke negara-negara tujuan ekspor utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa sebagai akibat melemahnya perekonomian di negara-negara tersebut. Di tingkat nasional, penurunan pangsa tersebut sebagai akibat tidak optimalnya kinerja sektor industri sehingga menurunkan daya saing karena faktor-faktor seperti ketersediaan gas yang sangat terbatas untuk sektor industri, keterbatasan pasokan energi listrik, masalah infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik, iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif seperti perizinan, pertanahan, perpajakan dan faktor birokrasi.

c. **Meningkatnya pertumbuhan sektor industri Luar Jawa.**

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 8,61 persen, sementara realisasinya adalah 6,23%. Perhitungan peningkatan pertumbuhan sektor industri pada tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional tahun 2015 yang telah dirilis oleh BPS.

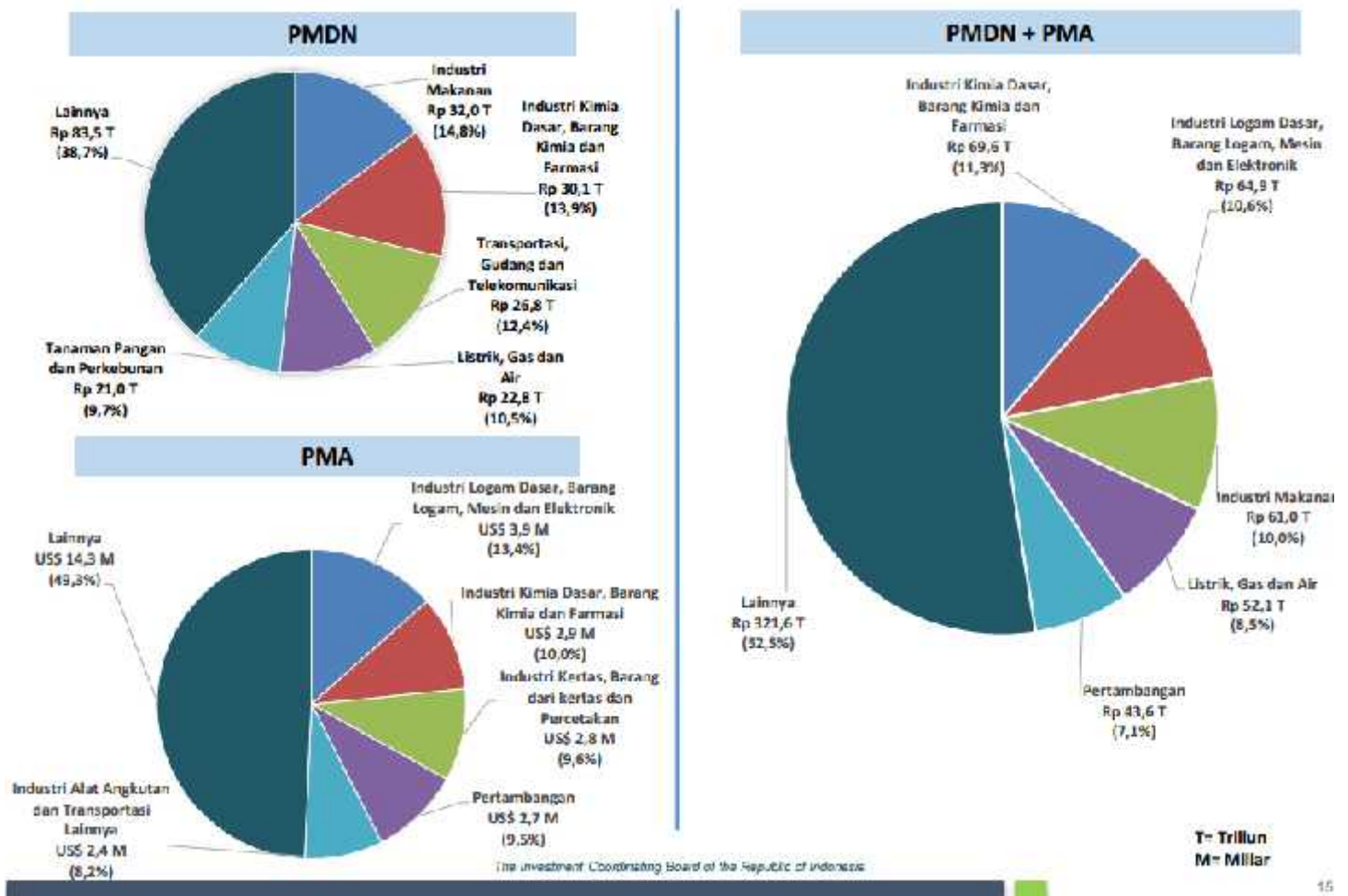
Pertumbuhan sektor industri di luar Jawa masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini lebih disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan energi seperti gas dan listrik dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sehingga menyebabkan investasi-investasi baru khususnya di sektor industri manufaktur masih lebih banyak memilih untuk berlokasi di Jawa yang infrastrukturnya lebih lengkap. Pemerintahan saat ini telah mengupayakan perbaikan infrastruktur terutama di wilayah Timur Indonesia dan juga penyelesaian berbagai regulasi di pusat-daerah yang menghambat iklim investasi. Kedepan diharapkan pertumbuhan sektor industri dapat lebih meningkat di Luar Pulau Jawa.

d. **Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Luar Jawa.**

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 29,50 persen, sementara realisasinya adalah 32,49 persen. Realisasi investasi dari perusahaan industri yang masuk ke kawasan industri di Luar Jawa, diproyeksi dengan menggunakan data investasi sektor industri yang masuk ke wilayah Luar Jawa. Hal ini dilakukan mengingat data investasi, khususnya investasi yang masuk ke kawasan industri di Luar Jawa tidak tersedia. Nilai capaian realisasi tersebut diperoleh berdasarkan asumsi perhitungan data realisasi investasi PMA dan PMND sektor industri pengolahan kumulatif sepanjang tahun 2016 s/d TW III.

Berdasarkan data BKPM yang dirilis sampai dengan Kuartal III Tahun 2016, total investasi PMA (FDI) sebesar Rp 266,8 triliun sedangkan PMDN (DDI) sebesar Rp 133,2 triliun, sehingga total realisasi investasi mencapai angka Rp 400 triliun. Nilai capaian tersebut baru mencapai kisaran 77% dari target tahunan dalam Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu sebesar Rp 519,5 triliun.

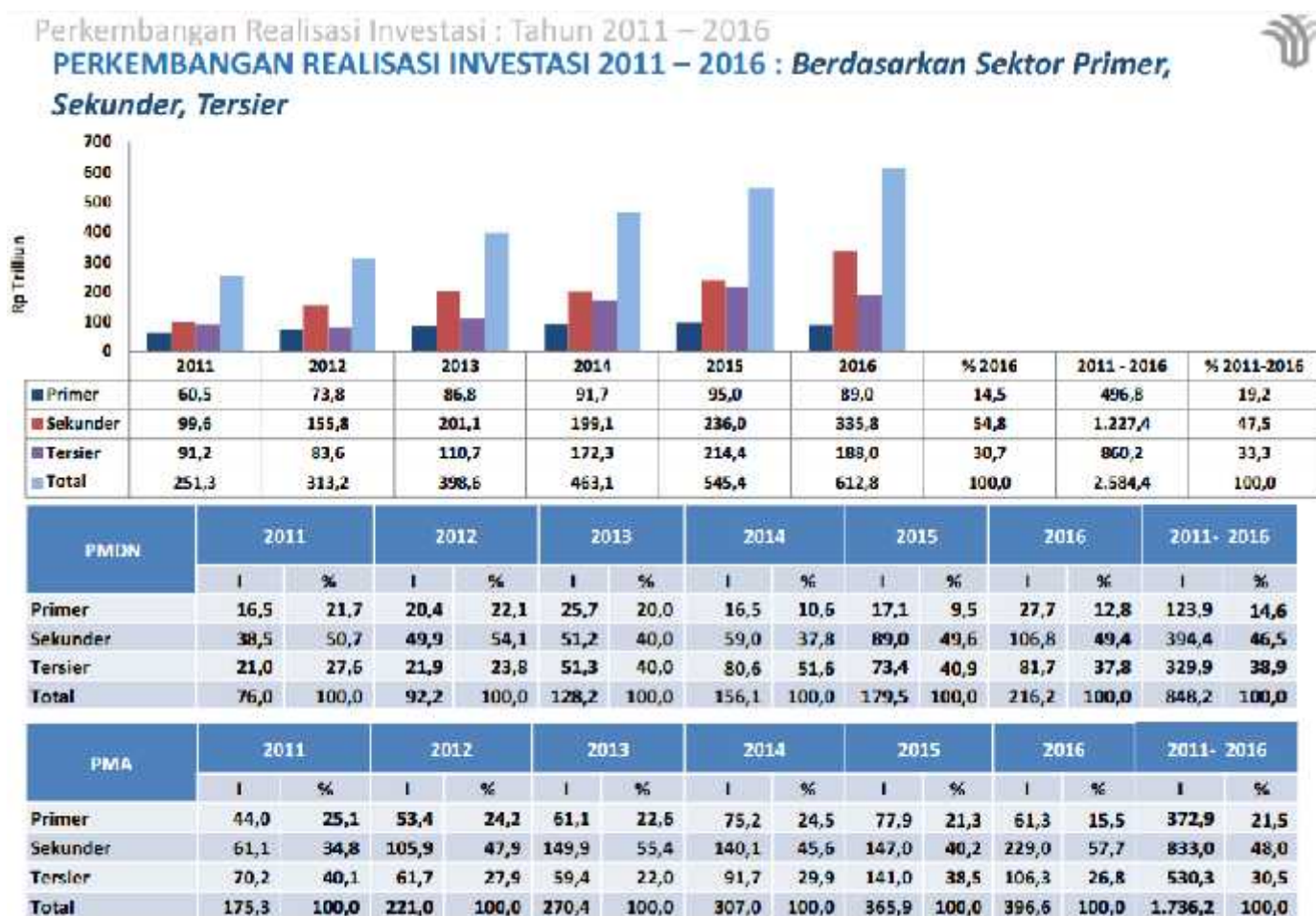
Gambar 3.1 Realisasi Investasi PMA dan PMDN menurut sektor s/d Kuartal III Tahun 2016



Sumber: BKPM (2016)

Realisasi investasi sektor industri pengolahan (sekunder) sampai dengan Kuartal III Tahun 2016 mencapai Rp 137,2 triliun dari total realisasi investasi sebesar Rp 612,8 triliun. Hal ini berarti sektor industri pengolahan masih menjadi magnet bagi investor dalam menanamkan modalnya, dimana kontribusi investasi sektor industri pengolahan (sekunder) mencapai 52,5%. Sedangkan kontribusi investasi sektor hulu perekonomian seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan (primer) hanya berkisar 9,7% dan kontribusi investasi sektor jasa (tersier) berkisar 22,9,0%.

Gambar 3.2 Realisasi Investasi PMA dan PMDN s/d Kuartal III Tahun 2016 Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier



Sumber: BKPM (2016)

e. Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di Luar Jawa

Target share sektor industri terhadap total PDRB di Luar Jawa sebesar 13,50 persen dan capaiannya pada tahun 2016 diperkirakan sekitar 16,04%. Perhitungan *share* sektor industri manufaktur tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan *share* sektor industri terhadap PDRB sampai tahun 2015. Untuk data terkait PDRB, data yang digunakan tidak bisa *update* sampai dengan tahun 2016 karena ada *time lag* selama 1 (satu) tahun sehingga yang digunakan adalah data tahun 2015 dengan tahun dasar 2011. Angka ini digunakan sebagai proyeksi untuk kondisi tahun 2016. Hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2015, dimana industri PDRB yang digunakan sebagai acuan adalah sampai tahun 2014. Dengan proyeksi tersebut diatas, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2016, pangsa nilai tambah sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

Tabel 3.4. Perbandingan Share Sektor Industri Pengolahan terhadap total PDRB di Luar Jawa

Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016
Sumatra	19.12	18.97	19.10	20.04	19.50
Kalimantan	16.13	16.61	4.77	4.64	4.27
Papua	10,66	10,79	17.03	17.95	17.31
Maluku	5,24	5,18	10.54	11.03	11.12
Bali & Nusa Tenggara	3,34	3,24	9.49	8.90	7.96
Sulawesi	10,23	10,18	23.52	23.72	23.14
Nasional	24,89	24,40	19.10	20.04	19.50

Tercapainya target share sektor industri di hampir seluruh Wilayah Luar Jawa tidak diiringi dengan perkembangan share sektor industri di tingkat nasional. Di tingkat nasional, share sektor industri terhadap total PDB pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 16,04 persen, dimana sebelumnya pada tahun 2015 dapat mencapai 16,59 persen. Tidak optimalnya peningkatan share sektor industri manufaktur ini disebabkan beberapa faktor baik di sisi sektor industri sendiri maupun sektor-sektor ekonomi lainnya. Di sisi sektor industri, penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor industri baik karena faktor – faktor di tingkat global maupun di tingkat nasional. Di tingkat global disebabkan oleh menurunnya ekspor produk-produk hasil industri ke negara-negara tujuan ekspor utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa sebagai akibat melemahnya perekonomian di negara-negara tersebut. Di tingkat nasional, penurunan share tersebut sebagai akibat tidak optimalnya kinerja sektor industri sehingga menurunkan penyertaan industri manufaktur karena faktor-faktor seperti ketersediaan gas yang sangat terbatas untuk sektor industri, keterbatasan pasokan energi listrik, masalah infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik, iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif seperti perijinan, pertanahan, perpajakan dan faktor birokrasi.

Untuk melihat bagaimana peranan sektor industri manufaktur di suatu provinsi secara relatif dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di tingkat nasional, dapat digunakan nilai LQ (Location Quotien). Nilai LQ yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur sudah menjadi sektor basis di suatu provinsi.

Tabel 3.5. Perkembangan Nilai LQ Sektor Industri Manufaktur menurut Provinsi

No.	Provinsi	LQ					Rata-Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Aceh	0.57	0.50	0.48	0.43	0.39	0.474
2.	Sumatra Utara	4.45	4.26	4.22	4.14	4.14	4.242
3.	Sumatra Barat	0.78	0.74	0.74	0.72	0.70	0.736
4.	Riau	5.91	5.72	5.64	5.55	5.64	5.692
5.	Kep. Riau	2.66	2.58	2.74	2.83	2.81	2.724
6.	Jambi	0.65	0.62	0.64	0.65	0.65	0.642
7.	Sumatra Selatan	2.31	2.12	2.05	2.14	2.14	2.152
8.	Bangka Belitung	0.58	0.55	0.54	0.54	0.51	0.544
9.	Bengkulu	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.108
10.	Lampung	1.63	1.55	1.61	1.60	1.66	1.61
11.	Kalimantan Barat	0.93	0.90	0.87	0.86	0.87	0.886
12.	Kalimantan Tengah	0.55	0.51	0.50	0.50	0.58	0.528
13.	Kalimantan Selatan	0.74	0.69	0.69	0.67	0.69	0.696
14.	Kalimantan Timur	6.19	5.13	4.56	4.14	4.03	4.81
15.	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	
16.	Sulawesi Utara	0.36	0.39	0.38	0.36	0.35	0.37
17.	Gorontalo	0.22	0.23	0.23	0.23	0.25	0.23
18.	Sulawesi tengah	0.35	0.35	0.33	0.32	0.31	0.33
19.	Sulawesi Selatan	0.55	0.57	0.58	0.58	0.59	0.58
20.	Sulawesi Barat	0.33	0.34	0.36	0.35	0.34	0.34
21.	Sulawesi Tenggara	0.28	0.33	0.33	0.30	0.29	0.31
22.	Nusa Tenggara Barat	0.15	0.15	0.17	0.19	0.18	0.17
23.	Nusa Tenggara Timur	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
24.	Maluku	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21
25.	Maluku Utara	0.58	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60
26.	Papua	0.06	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08
27.	Papua Barat	0.29	0.22	0.19	0.17	0.17	0.21

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin)

2. Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Luar Jawa dan Jawa

Tabel 3.6. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Luar Jawa dan Jawa

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Luar Jawa dan Jawa	Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI	9	9	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Berkembangnya industri unggulan daerah dalam WPPI	2	2	30 Daerah	30 Daerah	100%
Nilai capaian							
Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Luar Jawa dan Jawa							100%
Ket : T = target; R = realisasi							

Nilai capaian sasaran strategis tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Luar Jawa dan Jawa diukur melalui dua indikator kinerja :

- a. Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI;
- b. Berkembangnya industri unggulan daerah dalam WPPI.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Industri melalui Perwilayahan Industri yang dilaksanakan melalui : pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri kecil dan Industri Menengah (SIKIM).

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) merupakan wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah memiliki sasaran program/kegiatan berupa tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Luar Jawa dan Jawa, melalui indikator kinerja berupa :

a. Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

❖ Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Koridor Sulawesi, Maluku dan Papua

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terhadap kebijakan Kementerian Perindustrian untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan industri di Indonesia. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI bertujuan agar Pemerintah memiliki pedoman dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri dan acuan dalam pengembangan spasial industri di daerah baik dalam bentuk KPI, KI dan Sentra IKM. Dokumen tersebut adalah Masterplan Pengembangan WPPI di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Masterplan pengembangan WPPI adalah pedoman dalam pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, hasil rumusan dari Masterplan ini adalah

1. Rencana induk pengembangan WPPI dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan industri untuk masing – masing WPPI
2. Rencana strategis dan Rencana Aksi pengembangan WPPI
3. Kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan pusat pertumbuhan industri masing-masing WPPI

❖ Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Koridor Sumatra dan Kalimantan

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terhadap kebijakan Kementerian Perindustrian untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan industri di Indonesia. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI bertujuan agar Pemerintah memiliki pedoman dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri dan acuan dalam pengembangan spasial industri di daerah baik dalam bentuk KPI, KI dan Sentra IKM.

Di Sumatra, WPPI memiliki aktivitas industri cukup besar. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Sumatra dilakukan di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan dengan melihat konektivitas dari daerah lain.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kajian yang meliputi analisa spasial dan tata ruang, analisa kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung pengembangan WPPI, analisa sektor industri, analisa sistem logistik, analisa kebijakan publik, analisa ekologi dan analisa perencanaan strategis dan rencana aksi untuk mendukung implementasi pengembangan WPPI.

Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) yang dilaksanakan melalui desk study, survey, pengumpulan data dan informasi terkait WPPI, kajian kebijakan sektoral dan spasial terkait perindustrian di Provinsi Banten dan Sumatra Tengah, pemetaan dan kajian potensi sumberdaya wilayah yang terkait dengan sektor industri (sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya, sumberdaya alam, sumber daya infrastruktur dan logistik, kelembagaan, pendanaan), FGD (*Focus Group Discussion*) dalam rangka mendapatkan masukan dari para *stakeholder* terkait sebagai penyusunan masterplan, dan penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan WPPI. Adapun output yang dihasilkan adalah Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Pulau Sumatra dan Kalimantan yang berisi :

- Rencana Pengembangan WPPI di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan industri (indikasi lokasi Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra IKM dan arah pengembangan industri);
- Rencana pengembangan dan penyediaan kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan WPPI Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara (transportasi/logistik, sarana pendukung (air, listrik, energi, telekomunikasi) dan sumber daya manusia).
- Rencana strategis pengembangan WPPI Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara (kebijakan, strategi dan program dalam pengembangan WPPI)

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen masterplan yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur.

Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung dilakukan di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) yang dilaksanakan melalui desk study, survey, pengumpulan data dan informasi terkait WPPI, pemetaan data dan informasi terkait dengan masalah ekonomi, industri, investasi, perdagangan, infrastruktur dan logistik, sumber daya serta perwilayahan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung , FGD atau

rapat teknis dalam rangka mendapatkan masukan dari para stakeholder terkait penyusunan rencana induk, serta penyusunan rencana induk pengembangan WPPI (masterplan, rencana strategis, rencana aksi dan rencana pengembangan infrastruktur). Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah laporan pengembangan WPPI yang berisi :

- Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan WPPI di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan industri untuk masing-masing WPPI;
- Rencana Strategis dan Rencana Aksi Pengembangan WPPI Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung;
- Kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di masing-masing WPPI.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen masterplan yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur.

❖ **Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Untuk pengembangan WPPI Direktorat PWI III (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) pada tahun 2016 tidak menyusun masterplan. Adapun kegiatan pengembangan WPPI dilakukan melalui penyusunan Identifikasi Potensi dan Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur Pengembangan WPPI serta di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terhadap kebijakan Kementerian Perindustrian untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan industri di Indonesia. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI bertujuan agar Pemerintah memiliki pedoman dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri dan acuan dalam pengembangan spasial industri di daerah baik dalam bentuk KPI, KI dan Sentra IKM.

Mengingat daya dukung pulau Jawa yang terbatas, serta potensi peran industri sebagai motor penggerak ekonomi, maka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri merupakan agenda penting dalam mewujudkan struktur ekonomi nasional yang kokoh dan seimbang. Sejalan dengan amanat Undang-undang di atas, Kementerian Perindustrian akan terus berupaya untuk melakukan pemerataan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk Pulau

Jawa dimana sebagian besar aktivitas sektor industri nasional berlokasi, maka perlu dilakukan penataan agar industri di Pulau Jawa tetap dapat berdaya saing dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang ada.

Pada tahun 2016, Ditjen PPI memiliki sasaran program/kegiatan berupa tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, melalui penyusunan kajian pengembangan WPPI di beberapa daerah, program/kegiatan yang mendukung sasaran tersebut yaitu :

1. Identifikasi Potensi Pengembangan WPPI di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Dalam pembangunan dan pengembangan industri, perlu memperhatikan penyediaan infrastruktur pendukung, penggunaan ruang untuk kegiatan produksi/jasa juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan memperkirakan kebutuhan fasilitas serta rencana jaringan penghubung. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur adalah wilayah yang memiliki potensi namun belum dikembangkan secara optimal sehingga perlu diidentifikasi potensi pengembangannya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kajian yang meliputi analisa spasial dan tata ruang, analisa kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung pengembangan WPPI, analisa sektor industri, analisa sistem logistik, analisa kebijakan publik, analisa ekologi dan analisa perencanaan strategis dan rencana aksi untuk mendukung implementasi pengembangan WPPI. Adapun output yang dihasilkan dari kajian identifikasi pengembangan WPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berisi :

- Potensi ekonomi dan industri unggulan sebagai sektor penggerak di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (daya dukung lingkungan, ekonomi wilayah, sosial budaya, potensi sektor ekonomi dan industri unggulan di wilayah studi);
- Rencana pengembangan dan penyediaan kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan WPPI Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (transportasi/logistik, sarana pendukung (air, listrik, energi, telekomunikasi) dan sumber daya manusia).
- Rencana strategis pengembangan sektor ekonomi dan industri Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kebijakan, strategi dan program pengembangan)
- Rekomendasi kesesuaian wilayah studi menjadi WPPI (arahan pemanfaatan

kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra IKM).

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen kajian yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait.

2. Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur WPPI di Jawa Barat

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun kajian kebutuhan infrastruktur air, energi, sumber daya manusia, teknologi, transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki 2 WPPI, yaitu Jawa Barat bagian barat (Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang) dan Jawa Barat bagian timur (Cirebon-Indramayu-Majalengka). Industri yang berperan besar dalam WPPI di Jawa Barat adalah industri pengolahan. Sektor yang berpengaruh besar dalam memberikan kontribusi adalah industri produk logam, komputer, elektronik, optik dan peralatan listrik.

Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) yang dilaksanakan melalui desk study, survey, pengumpulan data dan informasi terkait WPPI, pemetaan data dan informasi kebutuhan infrastruktur air, energi, sumber daya manusia, teknologi, transportasi dan logistik yang mendukung pengembangan sumber daya industri dalam WPPI; FGD atau rapat teknis dalam rangka mendapatkan masukan dari para stakeholder terkait penyusunan rencana pengembangan infrastruktur; serta penyusunan strategi dan rekomendasi pengembangan infrastruktur dalam WPPI (rencana strategis, rekomendasi kebijakan, program, rencana aksi). Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sub kegiatan, yaitu :

- a. Kajian Kebutuhan Infrastruktur Air, Energi, SDM dan Teknologi dalam WPPI di Jawa Barat; dan
- b. Kajian Kebutuhan Transportasi dan Logistik dalam WPPI di Jawa Barat.

Keluaran (output) dari kegiatan kajian kebutuhan infrastruktur dalam WPPI yang berisi:

- Rencana pengembangan infrastruktur air, energi, SDM dan Teknologi dalam WPPI di Jawa Barat;
- Rencana pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Barat;
- Rencana Aksi Pengembangan infrastruktur air, energi, SDM dan Teknologi

dalam WPPI di Jawa Barat ;

- Rencana Aksi Pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Barat.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen kajian yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pengembangan infrastruktur dalam WPPI di Jawa Barat.

2. Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur WPPI di Jawa Timur

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun kajian kebutuhan infrastruktur air, energi, sumber daya manusia, teknologi, transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Timur. WPPI di Jawa Timur berada di daerah Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan. Industri yang berperan besar dalam WPPI di Jawa Timur adalah industri pengolahan. Sektor yang berpengaruh besar dalam memberikan kontribusi adalah industri makanan dan minuman.

Keluaran (output) dari kegiatan kajian kebutuhan infrastruktur dalam WPPI di Jawa Timur yang berisi :

- Rencana pengembangan infrastruktur air, energi, SDM dan Teknologi dalam WPPI di Jawa Timur;
- Rencana pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Timur;
- Rencana Aksi Pengembangan infrastruktur air, energi, SDM dan Teknologi dalam WPPI di Jawa Timur;
- Rencana Aksi Pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Timur.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen kajian yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pengembangan infrastruktur dalam WPPI di Jawa Timur.

b. Berkembangnya industri unggulan daerah dalam WPPI

Terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, Ditjen PPI tidak mempunyai program atau kegiatan yang secara langsung mendukung tercapainya IKU ini karena pengembangan industri bukan merupakan Tupoksi Ditjen. Pada dasarnya seluruh

kegiatan Ditjen PPI mendukung berkembangnya industri unggulan daerah. Adapun capaian yang didapatkan dari indikator ini secara tidak langsung dari penyusunan masterplan pengembangan WPPI, review KPI, Sentra IKM dan Kawasan Industri. Dalam penyusunan Masterplan WPPI, Ditjen PPI mengutamakan industri unggulan daerah terkait dalam penyusunan masterplan daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendukung industri unggulan sehingga selaras dengan RPJMN dan RIPIN. Adapun daerah yang berhasil difasilitasi industri unggulan Daerah melalui WPPI, Sentra IKM, review KPI dan fasilitasi pembangunan Kawasan Industri adalah Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, NTB, NTT.

3. Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri

Tabel 3.7. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri	Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan	10	19	10 Kawasan Industri	15 Kawasan Industri	150%
		Beroperasinya Pusat Layanan Teknis Kawasan Industri berupa Pusat Inovasi Kelapa Sawit (PIKS) Sei Mangkei dan Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) Palu	2	2	2 Kawasan Industri	2 Kawasan Industri	100%
Nilai capaian Tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri							125%
Ket : T = target; R = realisasi							

Tabel 3.9. Capaian Fasilitas Kawasan industri

No.	Kawasan Industri	Kegiatan
1.	Sei Mangkei	1. Penyusunan Kajian Penataan Kawasan Industri; 2. Penguncian wesel dalam rangka pembangunan jalur kereta api di KI Sei Mangkei; 3. Modifikasi Wesel pada jalur kereta api di KI Sei Mangkei; 4. Pengelasan thermit dalam rangka pemangunan jalur kereta api di KI Sei mangkei.
2.	Tanggamus	Penyusunan Kajian Penataan Kawasan Industri
3.	Jorong	Penyusunan Kajian Penataan Kawasan Industri
4.	Ketapang	Penyusunan Kajian Penataan Kawasan Industri
5.	Batu Licin	Penyusunan Kajian Penataan Kawasan Industri
6.	Garut	Penyusunan dokumen Studi Kelayakan
7.	Indramayu	Penyusunan dokumen Studi Kelayakan
8.	Madiun	Penyusunan dokumen Studi Kelayakan
9.	Bitung	1. Lanjutan pembangunan Kantor Pengelola; 2. Lanjutan Pembangunan jalan poros.
10.	Palu	Lanjutan pembangunan Kantor Pengelola
11.	Morowali	Lanjutan Pembangunan Gedung Politeknik dan pusat inovasi logam
12.	Mamuju	Penyusunan Dokumen Masterplan
13.	Mimika	Penyusunan Dokumen Masterplan
14.	Tanjung Api-Api	Penyusunan Dokumen DED
15.	Gandus	Penyusunan Dokumen Masterplan

Dalam pengembangan perwilayahan industri sebagaimana pada pasal 14 dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 disebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri di beberapa daerah melalui indikator kinerja :

a. Terfasilitasinya Kawasan Industri dalam Penyusunan Kajian dan Dokumen Perencanaan pembangunan;

Adapun capaian dari indikator kinerja diperoleh melalui kegiatan :

- **Fasilitasi Kawasan Industri di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua**

Fasilitasi kawasan industri yang dilakukan di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua antara lain KI Bitung melalui lanjutan pembangunan kantor pengelola; KI Palu melalui lanjutan pembangunan kantor pengelola; KI Morowali melalui lanjutan pembangunan gedung politeknik dan lanjutan pembangunan pusat inovasi logam selain itu diadakan lanjutan pelatihan pengembangan SDM Industri Lokal untuk KI Morowali. Selain fasilitasi pembangunan Kawasan Industri Prioritas, Ditjen PPI pada tahun 2016 juga melakukan fasilitasi di luar Kawasan Industri Prioritas antara lain penyusunan dokumen masterplan Kawasan Industri Mimika dan Mamuju.

- **Fasilitasi Kawasan Industri di Wilayah Kalimantan dan Sumatra**

Penyusunan Dokumen Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman. dimaksudkan agar kawasan industri serta lingkungannya tertata dengan baik dengan kelengkapan sarana dan prasarana dan memperhatikan dampak lingkungan. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) melalui desk study, survey, penyusunan desain fisik, kajian wilayah dan topografi serta struktur ruang, kajian industri yang akan menjadi penggerak kawasan industri, FGD dengan stakeholder terkait, konsultasi publik, penyusunan album gambar (bestek) yang memuat gambar rancangan, detail rancangan dan gambar konstruksi, penyusunan dokumen rencana anggaran biaya (termasuk analisa kelayakan finansial) dan analisa rinci spesifikasi teknis, kelembagaan serta menyusun siteplan.

Pihak ketiga bertugas membuat suatu dokumen perencanaan teknis yang lengkap sehingga ada satu dokumen kegiatan Perencanaan Teknis (DED) pembangunan kawasan industri Banyuwangi dan satu dokumen masterplan kawasan industri Bangkalan, dimana penyusunan dokumen ini bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fisik di lapangan sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas dan bangunan yang handal.

Pembangunan kawasan industri diawali dengan Pra FS, penyusunan Masterplan, hingga pada tahap pembangunan dengan mengacu pada rencana detail kawasan yang dituangkan dalam rencana Detailed Engineering Design. Detail Engineering Design (DED), merupakan tahap pengembangan perencanaan, dilakukan penyempurnaan analisa elemen struktur sehingga diperoleh suatu konfigurasi struktur yang baik dari segi kekuatan, kestabilan, keamanan dan ekonomis. Dengan demikian dapat diperoleh suatu desain struktur bangunan yang optimal.

Penyusunan Dokumen Masterplan Kawasan Industri di Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman. bertujuan untuk membantu pengembangan industri di Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman melalui rencana pembangunan kawasan industri. Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki daerah yang sangat potensial dijadikan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman.. Dengan adanya mega proyek KEK DI Tanjung Api-Api, tentunya akan menjadikan Gandus dan Tanjung Api-API sebagai pusat pertumbuhan baru di Sumatera Selatan.

Salah satu syarat dalam pembangunan kawasan industri adalah persyaratan dokumen perencanaan kawasan, yang salah satunya berupa masterplan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana masterplan kawasan industri di Gandus, Tanjung Api-Api, Padang Pariaman.

Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga yang bertugas menganalisis kesesuaian lokasi peruntukan kawasan industri, melakukan kajian wilayah dan topografi tanah, menganalisa struktur ruang, mengkaji industri yang akan menjadi penggerak kawasan industri, menyusun konsep pengembangan kawasan industri, menyusun rencana zoning dan besaran perbandingan lahan, menyusun rencana pengembangan infrastruktur atau sarana/prasarana, menyusun site plan kawasan industri, menganalisa kelayakan finansial serta kelembagaannya.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri tersebut kepada stakeholder yang terkait.

Penyusunan kajian penataan kawasan industri di Sei Mankei, Jorong, Batu Licin, Ketapang, dan Tanggamus bertujuan untuk menyusun rencana penataan dan pengembangan kawasan industri di Sei Mankei, Jorong, Batu Licin, Ketapang, dan Tanggamus yang meliputi .Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga melalui koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis dengan output yang diharapkan berupa dokumen program dan bentuk penataan KI di Sei Mankei, Jorong, Batu Licin, Ketapang, dan Tanggamus, dokumen program dan bentuk penataan KI Sei Mankei, Jorong, Batu Licin, Ketapang, dan Tanggamus dan dokumen program dan bentuk penataan KI di masing-masing kabupaten/kota wilayah studi yang di dalamnya mencakup analisa karakteristik industri eksisting, analisa kesesuaian kawasan industri/zona industri eksisting, analisa kinerja infrastruktur pendukung kawasan industri, review tata ruang wilayah dan peraturan terkait pengembangan kawasan industri, identifikasi dan analisa permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama pengembangan kawasan industri, analisa kondisi kawasan industri, tantangan

dan hambatan pengembangan kawasan industri di masa akan datang, analisa kelayakan pengembangan kawasan industri, penyusunan peta rencana penataan dan pengembangan kawasan industri, rencana kebutuhan infrastuktur pendukung kawasan industri serta penyusunan strategi penataan kawasan industri di wilayah studi.

Secara umum pelaksanaan seluruhkegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri yang telah disusun tersebut kepada stakeholder di daerah untuk dijadikan rekomendasi penataan dan pengembangan kawasan industri.

- **Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Jawa Barat dan Jawa Timur

Sesuai dengan amanat undang-undang, setiap perusahaan industri baru wajib masuk ke dalam kawasan industri dengan pertimbangan agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, ramah lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur pendukung. Adapun dampak yang diharapkan dalam pembangunan kawasan industri antara lain memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, memberikan kepastian hukum lokasi tempat usaha sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha, dan mengatasi permasalahan tata ruang sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Implementasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan :

1. Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Industri di Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu;
 2. Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Industri di Kabupaten Madiun
- Keluaran (output) dari kegiatan perencanaan pembangunan kawasan ini berupa:
- *Basic design* kawasan industri yang mengkaji unsur-unsur fungsional ruang/tapak kawasan, gambaran kebutuhan infrastruktur dan gambaran zonasi kawasan;
 - Dokumen pra FS pembangunan kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur;

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen kajian yang telah disusun kepada stakeholder terkait.

b. Beroperasinya Pusat Layanan Teknis Kawasan Industri berupa Pusat Inovasi Kelapa Sawit (PIKS) Sei Mangkei dan Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) Palu

- Kegiatan Pendampingan Pengembangan Industri Rotan di Pusat Pengembangan Rotan

Merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pengembangan industri nasional adalah dengan memfokuskan suatu kawasan industri berdasarkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Setelah terbangun Kawasan Industri, perlu dibangun dan dikembangkan Pusat Pengembangan Industri Rotan yang dapat meningkatkan nilai tambah terhadap bahan mentah atau produk dari komoditi industri unggulan propinsi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mendukung PIRNAS Palu melalui kegiatan operasional PIRNAS antara lain pemeliharaan. Selain itu telah dilaksanakan riset karakteristik rotan dan untuk meningkatkan daya saing produk telah dilaksanakan Pamren Luar Negeri di Jerman dan Pameran Dalam Negeri IFFINA dan JIFFINA.

- Kegiatan pendampingan fasilitasi inovasi produk industri kelapa sawit dan turunannya di Kawasan Industri Sei Mangkei

Selain pembangunan fasilitas dan infrastruktur, dalam rangka meningkatkan daya saing industri unggulan di Kawasan Industri Sei Mangkei sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 yaitu fokus utama pengembangan KI Sei Mangkei adalah industri penghiliran Kelapa Sawit yang merupakan komoditas alam andalan Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri bekerjasama dengan tenaga ahli terkait melaksanakan kegiatan fasilitasi inovasi produk industri kelapa sawit dan turunannya Di Kawasan Industri Sei Mangkei. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mendukung fasilitasi inovasi produk industri kelapa sawit dan turunannya di KI Sei Mangkei antara lain:

1. Preparasi Nanokristal Selulosa dari tandan sawit dan abu boiler pabrik kelapa sawit sebagai organo-filler nanokompos;
2. Produk kemasan pangan dari kelapa sawit dengan aktivitas antimikrob dan antioksidan;
3. Ekstraksi vitamin E dari CPO sebagai bahan aktif formulasi krim anti aging;

4. Untuk kegiatan operasional Pusat Inovasi di KI Sei Mangkei dalam rangka peningkatan SDM diadakan pelatihan penjamina dan pengendalian mutu serta manajemen keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium.

Dengan adanya pusat inovasi kelapa sawit di Sei Mangkei diharapkan dapat mendukung proses bisnis di KI Sei Mangkei dan terutama meningkatkan daya saing industri unggulan di Sumatera Utara.

4. Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)

Tabel 3.9. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Strategis Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan	7	17	8	51 SIKIM	637%
Nilai capaian Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)							637%
Ket : T = target; R = realisasi							

Tabel 3.11 Capaian Fasilitasi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

No.	Kab/Kota	Jenis Kegiatan	DAK SIKIM 2016 (Rp Juta)
1	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan Sentra	235,66
2	Kab. Buol	Pembangunan Sentra	2.703,72
3	Kab. Morowali	Pembangunan Sentra	1.282,86
4	Kab. Parigi Moutong	Pembangunan Sentra	
5	Kab. Tojo Una Una	Pembangunan Sentra	2.738,68
6	Kab. Kolaka	Pembangunan Sentra	1.201,46
7	Kota Kendari	Pembangunan Sentra	348.710,00
8	Kab. Polewali Mandar	Pembangunan Sentra	1.432,99
18	Kab. Donggala	Pembangunan Sentra	2.534,73
19	Kab. Luwu	Pembangunan Sentra	2.120,420
20	Kab. Konawe Selatan	Pembangunan Sentra	6.178,90
21	Kab. Maluku Tenggara Barat	Pembangunan Sentra	936,67

22	Kab. Konawe Utara	Pembangunan Sentra	1.323,49
23	Kab. Buton Tengah	Pembangunan Sentra	1.415,73
24	Kota Palopo	Pembangunan Sentra	1.649,15
25	Kota Palu	Pembangunan Sentra	2.375,03
26	Kab. Bulukumba	Pembangunan Sentra	1.661,50
27	Kab. Kepulauan Talaud	Pembangunan Sentra	1.095,96
28	Kab. Sorong Selatan	Pembangunan Sentra	4.951,77
29	Kab. Seruyan	Dokumen Pola Pengembangan Sentra IKM Kab. Seruyan (perikanan)	354,99
		Perencanaan Konstruksi (DED) Sentra IKM Kab. Seruyan	200,00
30	Kab. Tarakan	Dokumen Pola Pengembangan Sentra IKM (kapal rakyat)	390,45
		Perencanaan Konstruksi (DED) Sentra IKM Kab. Tarakan (kapal rakyat)	200,00
31	Kab. Aceh Selatan	Dokumen Pola Pengembangan Sentra IKM Kab. Aceh Selatan	200,00
32	Kab. Banyuasin	Dokumen Pola Pengembangan Sentra IKM Kab. Banyuasin	200,00
		Pembangunan Sentra IKM (kelapa)	1.470,24
33	Kab. Sijunjung	Dokumen Pola Pengembangan Sentra IKM (asam gelugur)	200,00
		Pembangunan Sentra IKM (songket)	1.167,13
34	Kab. Payakumbuh	Dokumen Pola Pengembangan Sentra IKM	200,00
35	Kab. Pesisir Selatan	Dokumen Pola Pengembangan Sentra IKM (perikanan)	200,00
36	Kab. Aceh Tenggara	Pembangunan rumah produksi (tahu tempe)	3.277,77
37	IKM Kab. Aceh Barat Daya	Pembangunan Sentra IKM Kab. Abdya	1.701,38
38	Kab. Bireun	Pembangunan Sentra IKM Kab. Bireun (kayu)	1.488,74
39	Kab. Way Kanan	Pembangunan Sentra IKM Kab. Way Kanan (meubel)	306,00
40	Kab. Langkat	Pembangunan Sentra IKM Kab. Langkat (meubel)	3.048,74
41	Kab. Dharmasraya	Pembangunan Sentra IKM Kab. Dharmasraya (alsintan)	1.099,38
42	Kab. Pidie Jaya	Pembangunan Sentra IKM Kab. Dharmasraya (makanan)	851,68
43	Kab. Murung Raya	Dokumen Pola Pengembangan Sentra IKM (batu mulia)	390,45
44	Kab. Bangka Tengah	Dokumen Pola Pengembangan Sentra IKM (pengolahan gaharu)	354,99
45	Kab. Alor, NTT	Pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tenun Alor	428,93
46	Kab. Manggarai Barat, NTT	Pembangunan rumah produksi pembuatan patung komodo.	482,74

47	Kota Serang, Banten	FS/Studi Kelayakan Gedung Industri Kecil dan Menengah Makanan Olahan Berbasis Ikan	2.316,82
48	Kab. Kupang, NTT	Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah	4.399,70
49	Kab. Manggarai Timur	Pembangunan sentra Tenun	1.085,90
50	Kab. Sumba Barat Daya, NTT	Pembangunan sentra Meubel dan tenun	2.038,90
51	Kab. Nagekeo	Pembangunan gedung sentra promosi produk industri (tenun)	2.686,67
52		Pembangunan Sentra IKM Batik	6.000,00
Total Fasilitas Sentra IKM			52 SIKIM di Kota/Kabupaten

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2014 untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama. Pengembangan Sentra IKM dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan Sentra IKM.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan pembangunan Sentra IKM di daerah. Hasil yang diharapkan adalah teridentifikasinya permasalahan terkait pembangunan Sentra IKM di daerah seperti kondisi lahan untuk pembangunan Sentra IKM, jenis industri yang menjadi andalan di Sentra IKM tersebut dan komitmen daerah untuk pembangunan Sentra IKM. Peran industri kecil dan menengah dalam pembangunan industri nasional sangat besar dan penyebarannya hampir merata disemua daerah, namun sebagian besar kegiatan industrinya belum tersentralisasi di satu lokasi. Hal ini antara lain berdampak kepada timbulnya masalah lingkungan dan terbatasnya dukungan infrastruktur. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan Sentra IKM di beberapa daerah melalui fasilitasi APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kementerian Keuangan. Adapun capaian dari indikator kinerja diperoleh melalui kegiatan :

1. Fasilitasi Sentra IKM dalam penyusunan Rencana Pembangunan di Sulawesi, Maluku dan Papua.

- Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Parigi Moutong, Jayapura, Kolaka, Sinjay, Maluku Tengah, dan Halmahera Utara;
- Pembangunan SIKIM Tual, Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran pada pertengahan tahun dan rencana akan dilanjutkan kembali pada tahun anggaran 2017.

2. Fasilitasi Sentra IKM dalam penyusunan Rencana Pembangunan di Sumatra dan Kalimantan

- Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

Kajian pola pengembangan sentra IKM di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menyusun pola pengembangan sentra industri Kabupaten/Kota wilayah Kabupaten/Kota di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan yang kegiatan ini dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dengan melakukan koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data dan FGD di daerah untuk menghimpun data serta masukan dari *stakeholder* terkait. Adapun output yang dihasilkan adalah dokumen kajian pola pengembangan sentra industri kabupaten/kota Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup didalamnya analisis konsep dan rencana pengembangan sentra IKM, review dan analisis kinerja Sentra IKM eksisting, identifikasi dan analisis permasalahan pengembangan Sentra IKM, identifikasi dan analisis potensi pengembangan Sentra IKM, identifikasi dan analisis kebutuhan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung sentra IKM, identifikasi dan analisis kelembagaan sentra IKM, serta rencana penguatan kelembagaan sentra IKM di wilayah studi.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan adalah menyampaikan dokumen kajian pola pengembangan sentra IKM di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah kepada stakeholder di daerah untuk dijadikan bahan

rekomendasi pengembangan Sentra IKM di wilayah tersebut. Sementara itu, rencana tindak lanjut untuk penyusunan masterplan pengembangan Sentra IKM di Sumatera adalah perencanaan konstruksi (DED) Sentra IKM di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan.

- Pembangunan SIKIM Seruyan, Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran pada pertengahan tahun dan rencana akan dilanjutkan kembali pada tahun anggaran 2017.

3. Fasilitasi Sentra IKM dalam penyusunan Rencana Pembangunan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

- Penyusunan Pola Pengembangan di Jawa Barat dan Jawa Tengah kegiatan ini bertujuan untuk menyusun model pola pengembangan sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Indramayu dan Kota Surakarta yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pembangunan sentra IKM sehingga mendorong terwujudnya pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah yang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing industri di daerah.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen pola pengembangan sentra IKM yang telah disusun kepada stakeholder di daerah serta penyusunan DED (*Detailed Engineering Design*) pembangunan sentra IKM di wilayah tersebut.

- Pembangunan SIKIM Sumbawa, Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya Pemotongan anggaran pada pertengahan tahun dan rencana akan dilanjutkan kembali pada tahun anggaran 2017.

5. Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Kabupaten/Kota

Tabel 3.12. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan	Terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/	43	46	62 Daerah	-	0

Industri Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota					
Nilai capaian						
Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota						0
Ket : T = target; R = realisasi						

Sebagai pengungkit dan pendorong pembangunan ekonomi, sektor industri Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sejak tahun 2004, terjadi perubahan internal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa konsekuensi meningkatnya peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perumusan Kebijakan Sektor Industri. Apabila dilihat secara makro, hal ini seringkali membawa ketidak efektifan dalam penyelenggaraan kegiatan industri secara nasional. Banyaknya pemegang kewenangan sektoral dan regional sering kali memberi dampak tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya sektor industri karena semua pihak berupaya untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingannya masing-masing.

Untuk itu, diperlukan suatu Peran Pemerintah pusat dalam mensinergikan kebijakan pembangunan industri di daerah (Provinsi dan Kabupaten). Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri awalnya akan melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di beberapa daerah. Namun, karena ada perubahan tugas pokok dan fungsi internal Kementerian Perindustrian maka Kegiatan ini dipindahkan ke Biro Perencanaan Kementerian perindustrian. Adapun kegiatan fasilitasi Rencana Pembangunan Industri Daerah (REPIDA) yang dilakukan oleh Ditjen PPI melalui Bimbingan teknis Penyusunan REPIDA Sulawesi Selatan dan Banten.

6. Meningkatnya penyebaran pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi yang efisien.

Tabel 3.14. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatnya penyebaran pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi yang efisien.

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang efisien	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi	5	5	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Nilai capaian							
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang efisien							100%
Ket : T = target; R = realisasi							

Nilai capaian indikator sasaran program/kegiatan ini hanya tercapai 100% diukur melalui tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran sebanyak 3 paket dokumen dari target yang ditetapkan serta tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data sebanyak 2 paket sesuai dengan target. Adapun capaian ini diperoleh melalui :

- a. Adapun Rapat Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah dilaksanakan pada tanggal 24 - 26 Februari 2016 di Surakarta untuk Wilayah III (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara), tanggal 10 - 12 Maret 2016 di Batam untuk Wilayah II (Sumatra dan Kalimantan), dan pada tanggal 22 - 24 Maret 2016 di Surabaya untuk Wilayah I (Sulawesi, Maluku, dan Papua). Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi dan sinkronisasi program pembangunan sektor industri antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif;
- b. Untuk penyusunan program Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri TA 2016 dilakukan melalui rapat sinergi dan koordinasi penyusunan program Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan untuk capaiannya dapat dilihat dari jumlah program/kegiatan yang tidak diblokir untuk TA 2016;
- c. Untuk penyusunan program Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri TA 2016 dilakukan melalui rapat sinergi, koordinasi penyusunan program Direktorat Jenderal

Pengembangan Perwilayahan Industri, penyusunan RKA-KL dan penyusunan dokumen Rencana Kinerja. Sedangkan, untuk untuk capaiannya dapat dilihat dari jumlah program/kegiatan yang tidak diblokir untuk TA 2016;

- d. *Monitoring* dan evaluasi pada awalnya akan dilakukan untuk kawasan Industri, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) tapi karena ada pemotongan anggaran dalam rangka penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, maka kegiatan monev Kawasan Industri hanya dilakukan sebanyak 1 kali bertempat di Medan melalui FGD yang dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait KI Sei Mangkei dan sedangkan untuk Sentra IKM tidak jadi dilaksanakan. Adapun pelaksanaan monev hanya dilakukan untuk Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dilakukan melalui pengisian kuesioner stakeholder terkait dan juga melakukan monitoring langsung di lapangan.
 - e. *Updating* data perwilayahan industri; dilakukan melalui kajian kinerja sektor industri di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Adapun metode yang kajian dilakukan melalui penyusunan ataupun memperbarui data-data perwilayahan industri di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk dokumen yang berfungsi sebagai *database* perwilayahan industri. Database tersebut berguna untuk mengukur capaian outcome dari program percepatan, penyebaran dan pemerataan industri.
7. **Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif**

Tabel 3.15. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatkan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif.

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan	Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	10	10	10 Dokumen kajian	10 Dokumen kajian	100%

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
	perwilayahan industri yang kondusif.						
Nilai capaian							
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif.							70%
Ket : T = target; R = realisasi							

Nilai capaian sasaran strategis meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif adalah sebesar 100% dalam bentuk tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri sebanyak 10 dokumen kajian yang terdiri dari :

- a. Peningkatan Kerjasama Promosi Dan Investasi Pengembangan Industri Daerah;
- b. Fasilitasi Penetapan Objek Vital Untuk Kawasan Industri; kegiatan penetapan objek vital nasional untuk Kawasan Industri dilakukan melalui sosialisasi OVN yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 di Medan. Namun demikian proses penetapan ini tidak bisa dilanjutkan hingga tahap akhir karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga, untuk tahun ini tidak ada penetapan Objek Vital Nasional (OVN) untuk Kawasan Industri;
- c. Komite Kawasan Industri; karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu maka kegiatan ini hanya sampai dengan tahap persiapan tidak sampai tahap akhir;
- d. Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri;
- e. Kajian Penyusunan Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Mendukung Kawasan Industri); kegiatan ini sudah berjalan 50 persen yaitu sudah pada tahap FGD dan pelaporan pendahuluan, namun tidak bisa dilanjutkan hingga ke laporan akhir karena karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu;
- f. Kajian Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Perekonomian Wilayah; kegiatan ini dilaksanakan hanya sampai pada tahap persiapan dan tidak bisa hingga ke tahap akhir karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu;

- g. Pedoman Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri dan Sentra IKM; kegiatan ini dilaksanakan hanya sampai pada tahap persiapan dan tidak bisa hingga ke tahap akhir karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu;
- h. Akreditasi Kawasan Industri 2016 kegiatan ini dilaksanakan hanya sampai pada tahap persiapan dan tidak bisa hingga ke tahap akhir karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu;
- i. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kab/Kota; kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena sebagian besar telah dipindahkan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kemenperin dan menjadi Tupoksi dari Biro Perencanaan. Tahun 2016 Setditjen PPI hanya memfasilitasi beberapa daerah saja dan tetap berperan dalam fasilitasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan;
- j. Penyusunan Peta Tematik Perwilayahan Industri (One Map Policy); kegiatan ini dapat dilaksanakan hingga tahap akhir yang diantaranya melalui Konsinyering pada tanggal 9 - 10 Juni 2016 di Bogor dan Workshop One Map Policy pada tanggal 26 - 29 Juli 2016 di Batam yang diikuti oleh kementerian lain dan stakeholder terkait;
- k. Penyusunan Naskah Akademik Pendirian UPT dalam Mekanisme BLU Pengelola Kawasan Industri yang dibentuk oleh Pemerintah; kegiatan ini hanya sampai pada tahap persiapan, setelah itu kegiatan ini tidak dilanjutkan pelaksanaannya hingga ke tahap akhir karena ada pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan;
- l. Kajian Mekanisme Pengadaan Lahan untuk Kawasan Industri Diprakarsai oleh Pemerintah; kegiatan ini hanya sampai pada tahap persiapan, setelah itu kegiatan ini tidak dilanjutkan pelaksanaannya hingga ke tahap akhir karena ada pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan;
- m. Penyediaan Sarana Publikasi dan Informasi Ditjen PPI; dilakukan melalui penerbitan Buletin Kawasan Industri dan Pengelolaan Website Ditjen PPI melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat internal maupun eksternal Kemenperin dapat mengakses data dan informasi terkait program percepatan penyebaran dan pemerataan industri yang dilaksanakan oleh Ditjen PPI. Di tahun 2016, Setditjen PPI sudah menerbitkan 1 edisi Buletin Kawasan Industri.

8. **Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum**

Tabel 3.16. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	2	1	2 Peraturan	2 Peraturan	100%
Nilai capaian							100%
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum							
Ket : T = target; R = realisasi							

Nilai capaian sasaran program/kegiatan meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum adalah sebesar 100% melalui tersusunnya 2 Peraturan yang tertuang dalam Permenperin 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagai revisi dari Permenperin No. 5 Tahun 2014 dan penyusunan Permenperin No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri sebagai revisi dari Permenperin No. 35 Tahun 2010. Selain Penyusunan, telah dilakukan sosialisasi terkait Penyusunan Permenperin No. 40 Tahun 2016 dan No. 35 Tahun 2016 sebanyak 3 Kali di Surabaya, Jakarta dan Makassar yang dihadiri oleh pengelola Kawasan industri dan stakeholder terkait. Selanjutnya perlu diadakan sosialisasi lanjutan khususnya di Kab/Kota yang akan/telah membangun Kawasan Industri.

Sedangkan untuk Penyusunan PP tentang Perwilayahan Industri masih dalam tahap harmonisasi, diperkirakan akan dilakukan rapat Pertemuan Antar Panitia (PAK) ke II pada Februari 2017. untuk Penyusunan Permenperin tentang Standar Kawasan

industri dan Permenperin tentang Pengecualian Berlokasi di Kawasan Industri masing-masing telah dilakukan FGD (*Forum Group Discussion*) sebanyak 1 kali di Jakarta yang dihadiri oleh *stakeholder* terkait.

Adapun capaian realisasi indikator ini diperoleh melalui kegiatan :

- a. Harmonisasi Peraturan terkait Perwilayahan Industri;
- b. Sosialisasi Peraturan terkait Perwilayahan Industri;
- c. Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Industri melalui *Policy Advisory Unit* (PAU);
- d. Penyusunan Permenperin terkait Perwilayahan Industri.

B. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PPI

Tabel 3.17 Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional	Jenis modul yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	1	-	1 Database	-	-
		Jenis data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	1	-	1 Database	-	-
		Jenis informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	2	-	2 Database	-	-
Nilai capaian							
Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota							-
Ket : T = target; R = realisasi							

Ditjen PPI belum melaksanakan kegiatan apapun untuk mencapai sasaran ini, karena anggaran yang ada tidak mencukupi dan lebih difokuskan untuk kegiatan prioritas terkait perwilayahan industri sebagaimana tugas dan fungsi Ditjen PPI.

Tabel 3.18 Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas	Tersusunnya Rencana Induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri	1	-	1 Dokumen	-	-
		Tersedianya data center yang handal	1	-	1 Database	-	-
Nilai capaian							
Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota							-
Ket : T = target; R = realisasi							

1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen PPI masih dalam tahap identifikasi dan pengumpulan data, karena data-data yang diperlukan sedikit mengalami kesulitan dalam mengakses data terkait kepada pengelola Kawasan Industri atau Pemda setempat;
2. Data Center Ditjen PPI saat ini masih dalam tahap pengembangan, karena cukup sulit untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan berdasarkan sumber data yang valid. Oleh sebab itu, sampai saat ini Ditjen PPI hanya bisa memfasilitasi dalam bentuk website, jika ada data-data terkait perwilayahan yang ingin di akses oleh masyarakat bisa diajukan melalui email yang tertera pada website Ditjen PPI.

Tabel 3.19 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	88	88	89 Persen	89 Persen	100%
Nilai capaian							
Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota							100%
Ket : T = target; R = realisasi							

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana kerja, Ditjen PPI telah mencapai 89% sesuai target yang ditetapkan. Adapun jumlah sarana dan prasarana yang telah difasilitasi oleh Ditjen PPI sudah sesuai dengan jumlah pegawai Ditjen PPI dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dilingkungan Ditjen PPI.

Tabel 3.20 Meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan	96	96	97 Persen	97 Persen	100%
		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri	73	68	74 Nilai	-	Belum dilakukan penilaian
Nilai capaian Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota							-
Ket : T = target; R = realisasi							

1. Tingkat ketepatan waktu Ditjen PPI dalam penyampaian laporan sudah mencapai 97% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini diukur melalui tanggal penyampaian dokumen laporan yang tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan;
2. Untuk nilai SAKIP Ditjen PPI Tahun 2016 belum dapat diukur capaiannya karena penilaiannya belum dilakukan, adapun capaian nilai SAKIP Ditjen PPI pada tahun 2015 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena kelengkapan dokumen penilaian SAKIP Ditjen PPI secara kualitas masih perlu banyak perbaikan.

Tabel 3.21 Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Tingkat kualitas laporan keuangan	73	73	74 Nilai	74 Nilai	100%

Nilai capaian	
Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota	-
Ket : T = target; R = realisasi	

Tabel 3.22 Meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal	4	4	4 Unit	4 Unit	100%
Nilai capaian							
Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota							-
Ket : T = target; R = realisasi							

Setiap unit Eselon II di lingkungan Ditjen PPI telah melaksanakan sistem pengendalian internal melalui penyusunan kertas kerja SPIP pada setiap kegiatan-kegiatan dan juga membentuk Tim Satgas SPIP melalui SK Dirjen PPI. Diharapkan melalui penerapan SPIP di lingkungan Ditjen PPI, dapat mengurangi resiko pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PPI

C. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

1) Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Target indikator ini adalah sebanyak 25 Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dengan capaian sebanyak 52 KPI yang meliputi 16 KPI di Wilayah Sumatera dan Kalimantan, 21 KPI di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan 15 KPI di Wilayah Maluku, Sulawesi dan Papua.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dilakukan melalui kegiatan review KPI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan mampu memberikan arahan dalam pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sehingga mampu menjadi sarana bagi aktivitas industri yang efektif, efisien dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Review KPI diutamakan untuk Kab/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) atau Kab/Kota yang Perda RTRW-nya akan di reuiu.

2) Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Jawa dan Bali

Tidak dilaksanakan karena sudah tidak menjadi indikator Ditjen PPI karena adanya perubahan Tupoksi. Tupoksi Ditjen PPI hanya pada pengembangan wilayah, bukan pada pengembangan industri;

3) Fasilitasi pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik

Tidak dilaksanakan karena sudah tidak menjadi indikator Ditjen PPI karena adanya perubahan Tupoksi. Tupoksi Ditjen PPI hanya pada pengembangan wilayah, bukan pada pengembangan industri

D. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran DIPA yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri pada awal Tahun 2016 sebesar Rp. 513.493.000.000,-, lalu pada bulan Maret setelah pemotongan menjadi sebesar Rp. 404.100.947.000. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016, anggaran DIPA menjadi Rp. 175.871.953.000 karena adanya *selfblocking* yang merupakan instruksi dari Kemenkeu dalam rangka penghematan anggaran. Adapun anggaran yang terserap sebesar Rp 157.316.411.099,- atau 90,83% dari pagu tanpa *selfblocking*. Tidak tercapainya target realisasi anggaran sesuai yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut

1. Adanya penghematan anggaran kegiatan-kegiatan Ditjen PPI terutama dikarenakan adanya perubahan kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan di luar kantor;
2. Adanya APBN-P terkait program nawacita Presiden Jokowi, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan sedikit terhambat karena harus menunggu pengesahan APBN;
3. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.

Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.17. Laporan Realisasi Anggaran Ditjen PPI Tahun Anggaran 2016 Menurut Sasaran Strategis

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Penyusunan rencana kebutuhan infratraktur WPPI di Papua dan Papua Barat	2.000.000.000	1.589.244.876	79.46
2.	Penyusunan rencana kebutuhan infratraktur WPPI di Maluku Utara	2.000.000.000	1.540.013.400	77.00

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
3.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan WPPI di Sulawesi Utara	1.750.000.000	1.458.430.000	83.34
4.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan WPPI di Sulawesi Tengah	1.750.000.000	1.471.227.000	84.07
5.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan WPPI di Sulawesi Tenggara	1.750.000.000	1.412.833.500	80.73
6.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan WPPI di Sulawesi Selatan	1.750.000.000	1.495.921.800	85.48
7.	Penyelenggaraan sosialisasi dan koordinasi pengembangan WPPI di daerah	1.000.000.000	325.485.400	32.55
8.	Review kawasan peruntukan industri (KPI) pendukung WPPI di Sulawesi Selatan	2.300.000.000	44.380.000	1.93
9.	Review kawasan peruntukan industri (KPI) pendukung WPPI di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara	2.700.000.000	2.049.509.700	75.91
10.	Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam kawasan industri	2.400.000.000	1.980.016.600	82.50
11.	Lanjutan penyelesaian pembangunan infrastruktur kawasan industri Bitung	5.800.000.000	5.738.316.960	98.94
12.	Pengadaan peralatan perkantoran di kawasan industri Bitung	2.750.000.000	95.365.600	3.47
13.	Pembangunan pagar, lansekap dan kelengkapan interior gedung kantor pengelola KI Palu	4.264.429.000	249.367.000	5.85
14.	Lanjutan penyelesaian pembangunan infrastruktur KI Palu	2.350.000.000	2.279.184.600	96.99
15.	Pengadaan peralatan perkantoran di KI Palu	2.750.000.000	81.396.200	2.96
16.	Operasional Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNAS) Palu dalam rangka pengembangan industri Rotan	4.500.000.000	2.393.742.281	53.19
17.	Peningkatan kapasitas Politeknik di KI Morowali	36.880.000.000	312.876.200	0.85
18.	Pelatihan Tingkat Lanjut pengembangan SDM Industri Lokal di KI Morowali	564.000.000	10.597.000	1.88
19.	Lanjutan penyelesaian pembangunan infrastruktur KI Morowali	8.000.000.000	6.375.245.107	79.69

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
20.	Pengadaan peralatan perkantoran dan pendidikan di KI Morowali	3.506.500.000	111.481.200	3.18
21.	Pembangunan Akademi Komunitas (Politeknik) di KI Bantaeng	45.761.871.000	198.175.800	0.43
22.	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Promosi di KI Prioritas (Teluk Bintuni, Buli, Morowali, Bitung, Palu, Bantaeng dan Konawe)	1.987.200.000	681.748.964	34.31
23.	Manajemen Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Industri I	2.750.000.000	324.195.875	11.79
24.	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mimika	2.500.000.000	2.018.244.883	80.73
25.	Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara	1.750.000.000	1.466.719.000	83.81
26.	Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Bantaeng	1.750.000.000	1.436.399.650	82.08
27.	Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Parigi Moutong dan Jayapura	1.750.000.000	1.402.020.500	80.12
28.	Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Kolaka dan Sinjai	1.750.000.000	1.400.732.700	80.04
30.	Penyusunan DED Sentra IKM di Kabupaten Halmahera Barat	800.000.000	6.000.000	0.75
31.	Koordinasi Pengembangan Sentra IKM di Wilayah I	1.000.000.000	220.880.553	22.09
32.	Pembangunan Sentra IKM Berbasis Hasil Laut di Kota Tual	340.000.000	124.558.000	36.63
33.	Pendampingan Pengembangan Industri Rumput Laut di Kota Tual	400.000.000	12.000.000	3.00
34.	Pendampingan Pusat Pengembangan Rotan Mamuju	800.000.000	578.533.650	72.32
35.	Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah I	1.000.000.000	493.264.267	49.33

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
36.	Layanan Manejeman Kinerja dan Operasional Perkantoran	1.000.000.000	534.641.593	53.46
37.	Penyusunan Master Plan Pengembangan WPPI Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	4.500.000.000	4.052.741.096	90.06
38.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Infrastruktur Industri di WPPI Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung	4.762.000.000	4.126.188.600	86.65
39.	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Koordinasi Pengembangan WPPI di Sumatera dan Kalimantan	500.000.000	335.998.400	67.20
40.	Review Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan	2.186.935.000	1.208.766.050	55.27
41.	Pembangunan Tank Farm di KI Sei Mangkei	61.441.000.000	46.928.280.700	76.38
42.	Pembangunan Jalan Poros di KI Sei Mangkei	58.441.000.000	188.456.339	0.32
43.	Operasional Pusat Inovasi Industri KEK Sei Mangkei dalam Rangka Pengembangan Inovasi Industri Berbasis Kelapa Sawit	2.614.200.000	1.770.273.087	67.72
42.	Koordinasi Percepatan Pembangunan KI Prioritas (Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tanggamus, Batu Licin, Landak, Ketapang dan Jorong)	1.186.598.000	721.486.778	60.80
43.	Penyusunan Detai Engineering Design (DED) KI di KEK Tanjung Api-api	1.570.000.000	104.214.800	6.64
44.	Penyusunan Masterplan KI di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Selatan	2.442.000.000	1.387.324.752	56.81
45.	Penyusunan Masterplan dan Rencana Strategis KI Kota Baru Padang Pariaman	1.439.000.000	429.501.600	29.85
46.	Penyusunan Masterplan KI Gandus di Kota Palembang Sumatera Selatan	1.949.317.000	901.258.279	46.23
47.	Perencanaan Percepatan Pengembangan KEK Lhokseumawe	980.000.000	530.553.300	54.14

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
48	Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Sumatera dan Kalimantan (Kab. Aceh Selatan, Kab. Banyuasin, Kab. Sijunjung, Kota Payakumbuh dan Kab. Pesisir Selatan)	3.423.070.000	1.484.568.527	43.37
49	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Wilayah Sumatera dan Kalimantan	500.000.000	254.216.830	50.84
50.	Pembangunan Sentra IKM di Kab. Seruyan	8.597.027.000	186.886.800	2.17
51.	Kaji Tindak dan Penanganan Permasalahan Pengembangan KI di Wilayan Sumatera dan Kalimantan	1.078.000.000	581.210.652	53.92
52.	Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan	500.000.000	476.474.857	95.29
53.	Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Direktorat PWI II	500.000.000	379.151.138	75.83
54.	Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Industri di NTB dan NTT	2.212.700.000	1.858.004.200	83.97
55.	Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur dalam WPPI di Jawa Barat	1.889.480.000	1.446.450.000	76.55
56.	Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur dalam WPPI di Jawa Timur	2.239.720.000	1.700.184.200	75.91
57.	Sosialisasi dan Koordinasi Pengembangan WPPI di Jawa	908.920.000	283.216.000	31.16
58.	Review KPI di Banten, DIY, Jawa Barat dan Jawa Tengah	3.806.318.000	2.942.939.200	77.32
59.	Review KPI di Jawa Timur, NTB dan NTT	4.481.878.000	3.402.589.500	75.92
60.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan KI di Jawa Barat dan Jawa Timur	2.905.550.000	2.399.476.100	82.58
61.	Penyusunan Pemetaan Profil KI di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	1.426.800.000	1.152.522.613	80.78
62.	Penyusunan DED Sentra IKM di Kab. Pamekasan dan Bangkalan	1.462.200.000	966.307.100	66.09
63.	Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Barat	1.560.800.000	1.218.448.300	78.07

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
64.	Pembangunan Sentra IKM di Kab. Sumbawa	10.389.802.000	319.737.000	3.08
65.	Koordinasi Pembangunan Sentra IKM di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	603.200.000	291.562.900	48.34
66.	Optimalisasi Kinerja KI di Jawa	967.600.000	706.588.885	73.02
67.	Kaji Tindak dan Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Perwilayahan Industri di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	909.400.000	349.740.959	38.46
68.	Koordinasi Penyusunan Program Wilayah Industri di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	500.000.000	371.979.000	74.40
69.	Layanan Manajemen Kinerja Direktorat PWI III	495.000.000	336.568.500	67.99
70.	Harmonisasi Peraturan Terkait Perwilayahan Industri	926.600.000	231.783.550	25.01
71.	Sosialisasi Peraturan Terkait Perwilayahan Industri	485.000.000	364.995.200	75.26
72.	Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Industri melalui PAU	735.000.000	149.185.000	20.30
73.	Penyusunan Permenperin Terkait Perwilayahan Industri	2.082.000.000	608.862.300	29.24
74.	Peningkatan Kerjasama Promosi dan Investasi Pengembangan Industri Daerah	1.979.810.000	279.790.700	14.20
75.	Fasilitasi Penetapan Objek Vital untuk Kawasan Industri	696.000.000	322.999.850	46.41
76.	Komite Kawasan Industri	1.504.244.000	343.746.200	22.85
77.	Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri	748.400.000	522.062.875	69.76
78.	Kajian Penyusunan Rencana Pemanfaatan SDA dalam Mendukung KI	617.000.000	306.595.300	49.69
79.	Kajian Dampak Pembangunan KI terhadap Perekonomian Wilayah	710.000.000	344.066.000	48.46
80.	Pedoman Fasilitasi Pembangunan KI dan Sentra IKM	710.000.000	143.394.000	20.20
81.	Akreditasi KI Tahun 2016	737.000.000	132.072.100	17.92
82.	Fasilitasi Pengembangan KPI melalui Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan	1.469.600.000	292.369.200	19.89

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Industri Propinsi/Kab/Kota			
83.	Penyusunan Peta Tematik Perwilayahan Industri (One Map Policy)	2.981.600.000	1.871.409.800	62.77
84.	Penyusunan Naskah Akademik Pendirian UPT dalam Mekanisme BLU Pengelola KI yang dibentuk oleh Pemerintah	2.200.000.000	79.853.000	21.81
85.	Kajian Mekanisme Pengadaan Lahan untuk KI yang diprakarsai oleh Pemerintah	690.000.000	133.511.000	19.35
86.	Penyediaan Sarana Publikasi dan Informasi Ditjen PPI	612.920.000	159.948.400	26.10
87.	Operasional Belanja Seditjen PPI	2.609.686.000	2.473.191.235	94.77
88.	Koordinasi Penyusunan Program Ditjen PPI Tahun 2017 (Sinergi, Koordinasi dan Pertemuan Teknis RKA-KL)	1.432.030.000	1.017.584.791	71.06
89.	Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Daerah dengan Pemerintah Prov/Kab/Kota	3.318.124.000	2.796.142.400	84.27
90.	Penyusunan Renkin dan Tapkin Ditjen PPI Tahun 2017	500.000.000	130.708.000	26.14
91.	Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pembangunan 14 KI Prioritas, WPPI dan Sentra IKM	1.248.578.000	589.952.000	47.25
92.	Koordinasi Penyusunan Kinerja Ditjen PPI (LAKIP, AKIP, SPIP, PP 39 dan Rapat Kerja DPR)	578.900.000	370.858.628	64.06
93.	Kajian Kinerja Sektor Industri Berbasis Wilayah Tahun 2011-2015	598.746.000	369.535.750	61.72
94.	Pengembangan Manajemen Keuangan Ditjen PPI	352.000.000	118.893.300	33.78
95.	Penatausahaan, Pembukuan dan Verifikasi Anggaran Ditjen PPI	452.000.000	427.745.500	94.83
96.	Implementasi SAK dan SIMAK BMN Ditjen PPI	1.500.000.000	828.048.100	55.20
97.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen PPI	502.000.000	332.752.518	66.29
98.	Pengelolaan dan Perbendaharaan Gaji Ditjen PPI	155.000.000	38.844.000	25.06
99.	Penyusunan Payung Hukum dalam rangka Penyertaan Modal Negara ke BUMN dan	814.800.000	303.398.200	37.24

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	BUMD Pengelola KI			
100.	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM	931.610.000	849.824.100	91.22
101.	Penataan Manajemen Kepegawaian Ditjen PPI	450.100.000	311.976.800	69.31
102.	Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Ditjen PPI Tahun 2016	484.000.000	121.078.800	25.02
103.	Data dan Informasi	99.500.000	99.497.000	100
104.	Gaji dan Tunjangan Ditjen PPI	12.777.708.000	12.284.844.743	96.14
105.	Operasional Rutin Ditjen PPI	2.048.000.000	1.842.579.583	89.97
TOTAL		175.192.388.000	157.316.411.099	90.83

Tabel 3.18. Laporan Realisasi Anggaran Ditjen PPI Tahun Anggaran 2015 Menurut Kegiatan

NO	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN 2016		
		Awal Tahun 2016 (Rp.)	Setelah Pemotongan (Rp.)	Setelah Self Blocking (Rp.)
1	Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I	246.064.000.000	156.104.000.000	46.112.456.000
2	Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II	174.634.000.000	159.360.147.000	75.780.908.000
3	Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III	38.850.000.000	36.759.368.000	19.819.568.000
4	Sekretariat Direktorat Jenderal PPI	40.052.000.000	37.051.724.000	19.333.313.000
	- Gaji dan Tunjangan	11.845.000.000	12.777.708.000	12.777.708.000
	- Operasional Rutin	2.048.000.000	2.048.000.000	2.048.000.000
DITJEN PPI		513.493.000.000	404.100.947.000	175.871.953.000

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Ditjen PPI Tahun 2016, secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen PPI telah berjalan dengan baik yang tercerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2016 dengan indikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengukuran Kinerja sasaran program/kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri memberikan hasil rata-rata sebesar 104,66 persen meskipun belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan dimana ada beberapa sasaran yang tidak mencapai 100 persen. Nilai tersebut telah menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri termasuk dalam kategori sangat baik;
2. Sasaran Strategis Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri memperoleh nilai capaian 96%;
3. Sasaran Strategis Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) memperoleh nilai capaian 145%;
4. Sasaran Strategis Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri memperoleh nilai capaian 145%;
5. Sasaran Strategis Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) memperoleh nilai capaian sebesar 100%;
6. Sasaran Strategis Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/kota memperoleh nilai capaian 106%;
7. Sasaran Strategis Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik memperoleh nilai capaian sebesar 100%;
8. Sasaran Strategis Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang efisien dan efektif memperoleh nilai capaian sebesar 100%;

9. Sasaran Strategis Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif memperoleh nilai capaian sebesar 100%;
10. Sasaran Strategis Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum memperoleh nilai capaian sebesar 50%.
11. Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2016 secara keseluruhan tanpa *selfblocking* sebesar 90,83% dari total pagu anggaran sebesar Rp175.871.0953.00 dan dengan *selfblocking* realisasi Ditjen PPI sebesar 43,52 dari pagu anggaran sebesar Rp 404.100.947.000,-;

B. Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tidak lepas dari berbagai kendala yang harus diselesaikan. Kendala yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masalah internal pengembangan perwilayahan
 - a. Penyebaran industri masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga terjadi kesenjangan dalam penyebaran industri;
 - b. Masih kurangnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang tersedia menjadi bahan baku dan atau bahan setengah jadi dan bahan jadi;
 - c. Masih kurangnya pengembangan potensi daerah yang berdasarkan keunikan daerah untuk mendorong kemandirian daerah berbasis potensi industri daerah dalam membangun daya saing;
 - d. Belum optimalnya kemampuan suatu daerah dalam rangka mengembangkan perekonomian melalui produk unggulan provinsi;
 - e. Masih terbatasnya kawasan industri di Luar Pulau Jawa dan belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri yang sudah ada.
2. Masalah eksternal pengembangan perwilayahan
 - a. Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, jembatan, pelabuhan kereta api, listrik, pasokan gas, dan lainnya);
 - b. Masalah kepastian hukum;
 - c. Ketersediaan lahan (masalah pembebasan lahan);

- d. Koordinasi dan sinergitas antar *stakeholders* belum optimal.
3. Masalah internal Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
- a. Turunnya DIPA tahun 2016 sudah pada bulan Desember 2015 tetapi secara riil pelaksanaan penyerapan anggaran baru dapat dimulai pada bulan April 2016 hal ini disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Ditjen PPI sehingga mempengaruhi proses keluarnya DIPA Tahun 2016;
 - b. Tertundanya proses lelang beberapa kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana terlambat sehingga realisasi anggaran DIPA tidak optimal;
 - c. Terdapatnya perubahan kebijakan pemerintah terkait perampingan dan efisiensi anggaran sehingga banyak kegiatan prioritas Ditjen PPI terkait fasilitas Kawasan Industri tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana awal karena adanya pemotongan dan *self blocking* anggaran oleh Kementerian Keuangan dalam rangka penghematan;
 - d. Waktu pelaksanaan kegiatan menumpuk pada akhir tahun 2016 karena terlambatnya DIPA Tahun 2016 sehingga kegiatan baru dapat dimulai pada awal bulan April, hal ini menyebabkan kesan kejar tayang penyelesaian pelaksanaan kegiatan dan tidak optimalnya tingkat realisasi anggaran karena semua pekerjaan dapat dimulai setelah penetapan anggaran;
 - e. Terdapat beberapa perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun sebelumnya, sehingga perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan, sementara dalam dokumen LAKIP diminta untuk membandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

C. Rekomendasi

Pencapaian kinerja yang berkelanjutan memerlukan adanya koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak untuk mewujudkan misi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri. Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas di masa yang akan datang, antara lain:

1. Evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pemantapan program pembangunan industri di daerah;

3. Mendorong investasi baru dan perluasan industri melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah;
4. Peningkatan disiplin, tata kerja, kerjasama, koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan *good governance* dalam rangka meningkatkan kinerja;
5. LAKIP digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi pada Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang;
6. Pembinaan dan pengembangan perwilayahan industri di masa yang akan datang perlu ditingkatkan, agar program utama dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi dapat terwujud. Upaya yang perlu ditingkatkan adalah :
 - a. Mengembangkan kawasan industri yang berdayasaing kuat, berbasis sumber daya alam lokal;
 - b. Melakukan perumusan strategi dan implementasi peningkatan daya saing global dengan prioritas pada potensi industri daerah berbasis sumber daya alam dalam artian luas;
 - c. Memperkuat unsur-unsur pokok pendukung penguatan daya saing industri di beberapa wilayah potensial, terutama di pusat-pusat pengembangan klaster industri di daerah;
 - d. Meningkatkan pengembangan perwilayahan industri dalam rangka menunjang program penyebaran wilayah industri;
 - e. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia aparatur perwilayahan industri.
7. Koordinasi/sinkronisasi/sinergi dengan instansi dan lembaga di pusat dan daerah yang lebih efektif dan terarah perlu ditingkatkan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan memperkuat kelembagaan dan aparat serta prasarana pendukung;
8. Penetapan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebaiknya seragam setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun (sesuai periode Rencana Strategis), kecuali jika terdapat sasaran dan IKU yang telah mencapai target sebelum periode Rencana Strategis berakhir.